



# LAPORAN KINERJA TRIWULAN 2

**TAHUN ANGGARAN 2024**

DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang investasi dan keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi ke depan.

Jakarta, 12 Juli 2024

**Direktur Usaha dan Investasi**



**Catur Sarwanto**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama Tahun 2024 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP selama periode triwulan II Tahun 2024, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan nilai investasi dan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Usaha dan Investasi yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Direktur Usaha dan Investasi dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja.

Dari 17 indikator kinerja tersebut sebanyak 14 (empat belas) telah dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2024, sedangkan indikator kinerja lainnya belum dapat diukur karena tidak ada target capaian pada triwulan II. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut ke-14 indikator kinerja telah mencapai target Triwulan II tahun 2024. Dengan capaian dimaksud, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan II Tahun 2024 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 108,02%.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Dari 17 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 9 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 7 indikator kinerja bersifat triwulanan.
2. Sebanyak 9 indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi, (2) Persentase

peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program, (3) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi, (4) Nilai penilaian mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi, (5) Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi, (6) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi, (7) Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi, (8) Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi dan (9) Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi.

3. Sebanyak 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP.
4. Sedangkan 7 indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu (1) Dokumen Peluang Investasi yang *Ready to Offer*, (2) Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan, (3) Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya, (4) Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina, (5) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha, (6) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir, (7) Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan.
5. Pencapaian realisasi indikator kinerja triwulan II atas 7 indikator yang bersifat triwulanan adalah (1) Dokumen Peluang Investasi yang *Ready to Offer*, teralisasi 1 peluang investasi *ready to offer* Komoditas Tuna di Kabupaten Biak Numfor dari target 1 dokumen atau dengan kata lain tercapai 100%; (2) Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan, teralisasi 2 kegiatan promosi dari target 1 kegiatan atau dengan kata lain tercapai 200%; (3) Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya, teralisasi 10 lembaga dari target 10 lembaga atau dengan kata lain tercapai 100%; (4) Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina, teralisasi 250 pelaku usaha dari target 250 pelaku usaha atau dengan kata lain tercapai 100%; (5) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha, teralisasi 623 UMKM dari target 600 UMKM atau dengan kata lain tercapai 103,83%; (6) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir, teralisasi 65 UMKM dari target 60 UMKM atau dengan kata lain tercapai 108,33%;

Pada Tahun 2024, anggaran Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Usaha dan Investasi adalah sebesar Rp22.723.500.000,-. Dari pagu anggaran awal tersebut, terdapat blokir sebesar Rp4.916.515.000,-, sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp17.806.985.000,-. Penyerapan anggaran Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp 5.801.035.638,- atau setara dengan 25,52% terhadap total pagu anggaran awal atau 32,58% terhadap pagu anggaran pasca blokir.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Direktorat Usaha dan Investasi yang telah dicapai selama triwulan II Tahun 2024, serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing Indikator Kinerja diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, agar kinerja dapat dijalankan lebih baik.

DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Tugas dan Fungsi .....	2
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia .....	4
1.5. Permasalahan Utama .....	6
1.6. Sistematika Penyajian .....	7
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
2.1. Rencana Strategis .....	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	16
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>18</b>
3.1. Capaian Kinerja .....	18
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	19
3.2.1. Sasaran Strategis 1 .....	20
Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan .....	20
3.2.2. Sasaran Strategis 2 .....	24
Tersedianya Peluang Investasi Yang <i>Ready to Offer</i> .....	24
3.2.3. Sasaran Strategis 3 .....	30
Terlaksananya promosi udaha dan investasi .....	30
3.2.4. Sasaran Strategis 4 .....	38
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan .....	38
3.2.5. Sasaran Strategis 5 .....	51

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha .....	51
3.2.6 Sasaran Strategis 6 .....	77
Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan .....	77
3.2.7 Sasaran Strategis 7 .....	80
Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi.....	80
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
4.1. Kesimpulan .....	94
4.2. Rekomendasi .....	94
4.3. Tindak Lanjut .....	95

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Usaha dan Investasi.....	16
Tabel 3. 1. Capaian Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023...	19
Tabel 3. 2 khtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan I Tahun 2024.....	22
Tabel 3. 3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan II Tahun 2024 .....	23
Tabel 3. 4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Peluang investasi Yang Ready to Offer Triwulan II Tahun 2024 .....	24
Tabel 3. 5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP Triwulan II 2024 .....	31
Tabel 3. 6 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan II 2024.....	39
Tabel 3. 7 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan II Tahun 2024 .....	52
Tabel 3. 8 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha Triwulan II Tahun 2024 .....	59
Tabel 3. 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi (UMKM) pada Triwulan II Tahun 2024.....	65
Tabel 3. 10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024 .....	78
Tabel 3. 11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024.....	80
Tabel 3. 12 Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2024 .....	82
Tabel 3. 13 Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan II Tahun 2024.....	84
Tabel 3. 14 Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024.....	88

Tabel 3. 15 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2024.....	89
Tabel 3. 16 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan II Tahun 2024.....	90
Tabel 3. 17 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan II Tahun 2024 .....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang).....	4
Gambar 1. 2 Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan.....	5
Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin .....	5
Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan .....	6
Gambar 3. 1 Dashboard Nilai NPSS Direktorat Usaha dan Investasi 18	
Gambar 3. 2 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi .....	22
Gambar 3. 3 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program.....	23
Gambar 3. 4 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program.....	24
Gambar 3. 5 Kunjungan ke OPD lingkup Pemkab Biak Numfor dan Instansi Terkait....	26
Gambar 3. 6 FGD Sinkronisasi Data Potensi dan Peluang Investasi Komoditas Tuna .	26
Gambar 3. 7 Kunjungan UPI PT Carvina Trijaya Makmur .....	27
Gambar 3. 8 Kunjungan UPI PT Anping Seafood Indonesia .....	28
Gambar 3. 9 Kunjungan UPI CV Samudera Pangan Indonesia .....	28
Gambar 3. 10 Kunjungan UPI PT Samudera Mandiri Sentosa.....	29
Gambar 3. 11 Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024 .....	32
Gambar 3. 12 Indonesia Tuna Investment and Business Forum (ITIBF) 2024.....	33
Gambar 3. 13 Pendampingan Minat Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan di Bogor .. .....	35
Gambar 3. 14 Pendampingan rencana investasi dari Brunei Darussalam (ATPD SDN BHD – Future JV In Indonesia).....	36
Gambar 3. 15 Pendampingan Investasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) .....	37
Gambar 3. 16 Peningkatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan di Tuban- Jawa Timur tanggal 4 April 2024 .....	41
Gambar 3. 17 Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sragen 7 Mei 2024 .....	42
Gambar 3. 18 Rapat Prapendirian Koperasi Di Kabupaten Serang 22 Mei 2024 .....	45
Gambar 3. 19 Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Kabupaten Kendal.....	47

Gambar 3. 20 Koordinasi Para Pihak Dan Bimtek Peningkatan Usaha Rumput Laut Berbasis Klaster Ekonomi Di Kabupaten Serang tanggal 20 Juni 2024	51
Gambar 3. 21 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Wirausaha Hasil KP di Probolinggo	53
Gambar 3. 22 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Wirausaha Hasil KP di Semarang	54
Gambar 3. 23 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Wirausaha Hasil KP di Kota Pasuruan	55
Gambar 3. 24 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Wirausaha Hasil KP di Kabupaten Bogor	55
Gambar 3. 25 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Wirausaha Hasil KP di Kab Sampang	56
Gambar 3. 26 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Wirausaha Hasil KP di Kota Semarang	56
Gambar 3. 27 Bimtek Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di Maluku Tengah	57
Gambar 3. 28 Bimtek Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di Melawi	58
Gambar 3. 29 Bimtek Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di Kota Kupang	58
Gambar 3. 30 Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur	66
Gambar 3. 31 Fasilitasi Kemitraan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan di Surabaya, Jawa Timur (Partisipasi pada Kegiatan Indonesia Tuna Investment & Bussiness Forum (ITIBF) 2024	67
Gambar 3. 32 Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur	68
Gambar 3. 33 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Segara Bhumi Indonesia (SBI) dan Koperasi Kampung Nelayan Maju (KALAJU) Pulau Pasaran	69
Gambar 3. 34 Identifikasi Kemitraan di Provinsi Banten	74
Gambar 3. 35 Identifikasi Kebutuhan Kemitraan Pelaku Usaha Rumput Laut di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara	77
Gambar 3. 36 Dashboard IP ASN Direktorat Usaha dan Investasi Semester I Tahun 2024	83

Gambar 3. 37 Pembahasan pengukuran capaian kinerja lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan I tahun 2024 .....	85
Gambar 3. 38 Pembahasan laporan kinerja level 1 dan 2 Ditjen PDSPKP periode triwulan I tahun 2024 .....	85
Gambar 3. 39 Pembahasan validasi Indikator Kinerja Level I dan II Ditjen PDSPKP Tahun 2024 .....	85
Gambar 3. 40 Pembahasan Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 .....	86
Gambar 3. 41 Rapat pemutakhiran target dan capaian rencana aksi nasional (RAN) Kewirausahaan dan KUKM TW I Tahun 2024 .....	86
Gambar 3. 42 Rapat pemutakhiran data progres pencapaian output lingkup Ditjen PDSPKP sampai dengan bulan Mei 2024 .....	86
Gambar 3. 43 Pembahasan Mekanisme dan Pedoman SAKIP serta Uji coba penilaian PM SAKIP lingkup Ditjen DSPKP Tahun 2024 .....	87
Gambar 3. 44 Penilaian Mandiri SAKIP Unit Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024 .....	87
Gambar 3. 45 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 22 Juli 2024 .....	89



# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat

sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2024. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan II Tahun 2024.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2024 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

## **1.3. Tugas dan Fungsi**

Sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi agar terwujud organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, dan adanya persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1136/M.KT.01/2020, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 25 September 2020, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya penetapan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Usaha dan Investasi;
- c. Direktorat Logistik;
- d. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu; dan
- e. Direktorat Pemasaran.

Selanjutnya dalam Pasal 99 Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Usaha dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan keberlanjutan usaha dan investasi meliputi pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan.

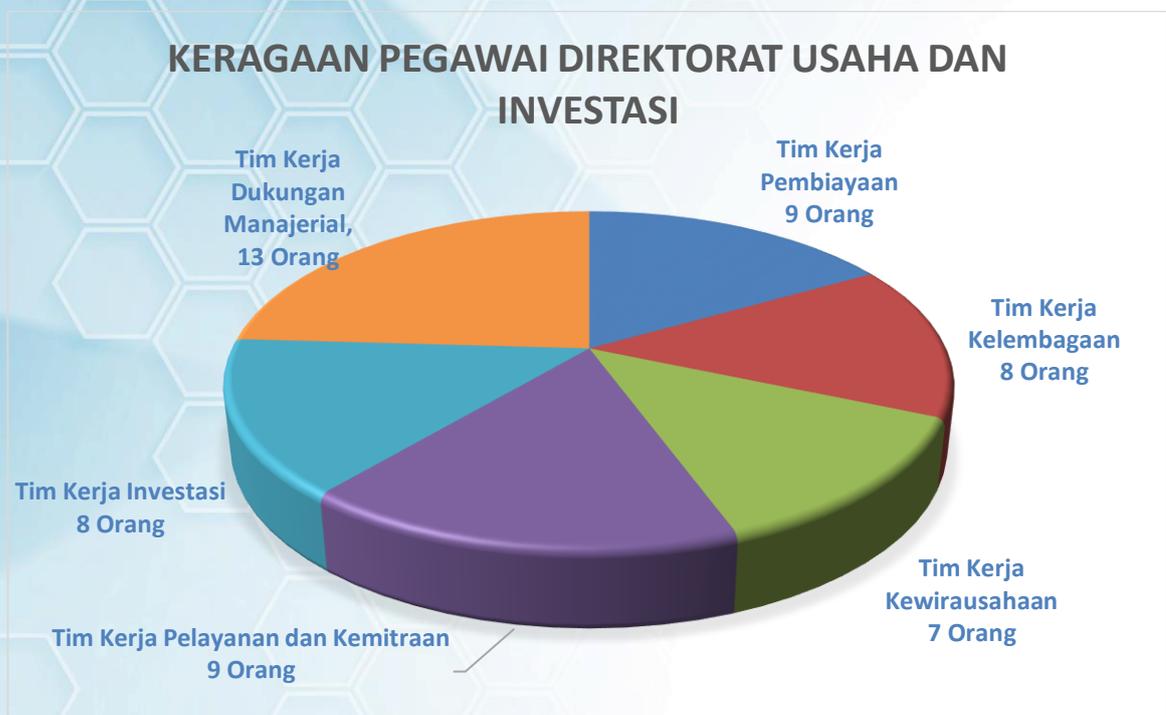
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Usaha dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### 1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia

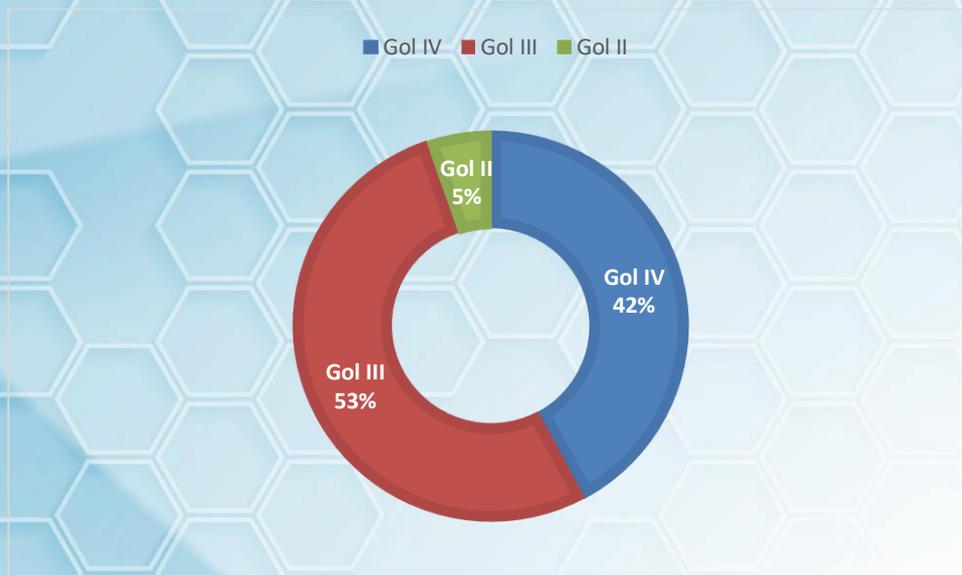
Jumlah sumber daya manusia atau pegawai Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 berjumlah 54 orang, yang terdiri atas 38 orang Aparatur Sipil Negeri (ASN), 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 3 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 3 orang Pegawai Jasa Langsung Perseorangan, yang tersebar di 6 Tim Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, meliputi Direktur sebanyak 1 orang, Tim Kerja Investasi sebanyak 8 orang; Tim Kerja Pelayanan dan Kemitraan sebanyak 9 orang; Tim Kerja Pembiayaan sebanyak 9 orang; Tim Kerja Kewirausahaan 7; Tim Kerja Kelembagaan sebanyak 8 orang; dan Tim Kerja Dukungan Manajerial sebanyak 12 orang.



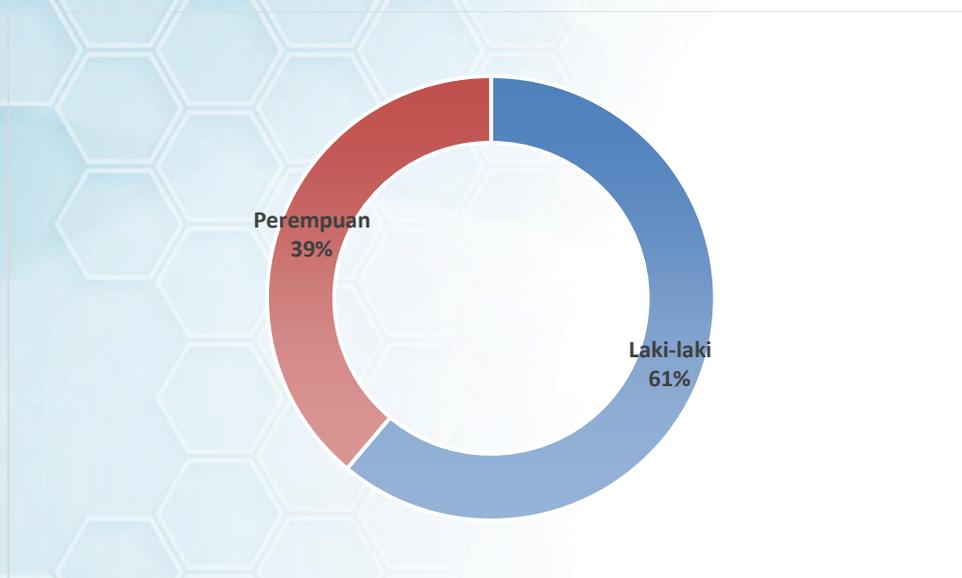
Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang)

2. Jumlah pegawai menurut golongan khusus ASN, meliputi golongan IV sebanyak 16 orang, golongan III sebanyak 20 orang, dan golongan II sebanyak 2 orang. Menurut golongannya, pegawai Direktorat Usaha dan Investasi terbanyak pada golongan III, yakni 53%.



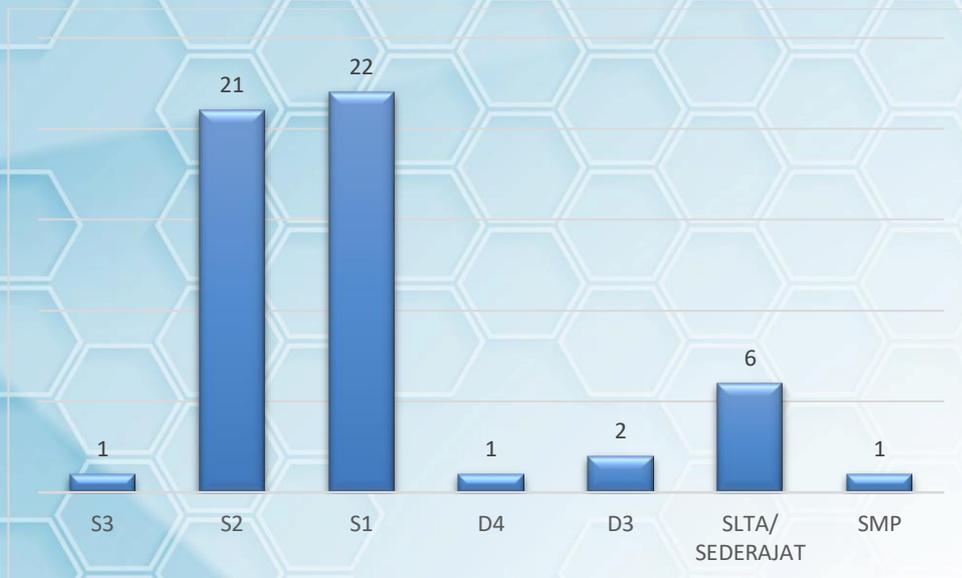
Gambar 1. 2 Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan

- Jumlah pegawai menurut jenis kelamin, meliputi laki-laki sebanyak 28 orang, atau 55% dari total pegawai Direktorat Usaha dan Investasi, dan perempuan sebanyak 21 orang, atau 45% dari total pegawai Direktorat Usaha dan Investasi.



Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

- Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, meliputi S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 21 orang, S1 sebanyak 22 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 6 orang dan SMP sebanyak 1 orang. Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Direktorat Usaha dan Investasi terbanyak dengan tingkat pendidikan S1, yakni mencapai 41%.



Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan

### 1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pembangunan hilirisasi industri melalui upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk mengimbangi permintaan masyarakat dunia yang terus meningkat terhadap produk ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi.

Dari sisi pemanfaatan potensi sumberdaya, berbagai upaya untuk peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan perlu terus dilakukan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain, kemudahan dalam berusaha bagi pelaku usaha mikro-kecil dan usaha menengah-besar, dan akses terhadap sumberdaya (modal, teknologi, sarpras, tenaga kerja) juga perlu mendapatkan perhatian. Pasca pandemi Covid-19 juga masih berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini turut mempengaruhi laju pertumbuhan investasi dan pembiayaan, utamanya bagi pelaku usaha mikro kecil. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini, agar kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan diantaranya:

1. Penyediaan informasi peluang investasi usaha di sektor kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan (*ready to offer*).
2. Pelayanan kemudahan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.
3. Penguatan korporasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam kerangka *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
4. Fasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5. Fasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan literasi utamanya tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

#### **1.6. Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP selama Tahun 2024, termasuk didalamnya capaian kinerja pada Triwulan II 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan II Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan II Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Usaha dan Investasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Usaha dan Investasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Usaha dan Investasi;

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Usaha dan Investasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Usaha dan Investasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Usaha dan Investasi untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran.**

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi menginduk pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEP-DJPDSKP/2021. Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 tersebut disusun sebagai tindak lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

#### 2.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk pembangunan nasional 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah “terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Visi tersebut tidak lain merupakan Visi Presiden tahun 2020-2024 yang juga diacu sebagai Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”.

#### 2.1.2 Misi

Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah menjalankan Misi Presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai misi pembangunan kelautan dan perikanan tahun

2020-2024 serta mendukung 5 (lima) Program Utama Presiden yang disampaikan dalam Pidato Pelantikan tanggal 9 Oktober 2019. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dan Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Dari 4 (empat) Misi Presiden yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dapat mendukung 2 (dua) misi yaitu: **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing serta Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.**

### 2.1.3 Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, Ditjen PDSPKP merumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
  - a. meningkatnya investasi kelautan dan perikanan  
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai investasi kelautan dan perikanan dari Rp5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2023;
  - b. meningkatnya pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program  
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp7,3 Triliun pada tahun 2023;
  - c. meningkatnya nilai kinerja logistik hasil perikanan  
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai kinerja logistik hasil perikanan dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
  - d. meningkatnya volume produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan volume produk olahan kelautan dan perikanan dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024;

e. meningkatnya konsumsi ikan

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan konsumsi ikan dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024;

f. meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024.

2. Melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP, dengan tujuan:

a. meningkatnya nilai PM PRB Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai PM PRB Ditjen PDSPKP dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;

b. meningkatnya nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai IKPA Ditjen PDSPKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

#### 2.1.4 Sasaran

Sasaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sebagai suatu *outcome/impact* dari pelaksanaan program pengelolaan perikanan dan kelautan, program nilai tambah dan daya saing industri, serta program dukungan manajemen.

Adapun sasaran tersebut adalah:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

a. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai investasi kelautan dan perikanan meningkat dari Rp 5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2024;
- 2) Kinerja logistik hasil perikanan meningkat dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
- 3) Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program meningkat dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,20 Triliun pada tahun 2024.

b. Sasaran: Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PDSPKP meningkat 4 (skala 1-5) pada tahun 2020 menjadi 5 (skala 1-5) pada tahun 2024.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

a. Sasaran: Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing meningkat dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024.

b. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai ekspor hasil perikanan meningkat dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024;
- 2) Konsumsi ikan meningkat dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024.

c. Sasaran: Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) meningkat dari 103,75 pada tahun 2020 menjadi 104,75 pada tahun 2024.

### 3. Program Dukungan Manajemen

Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PDSPKP.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024;
- 2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 82% pada tahun 2020 menjadi 86% pada tahun 2024;
- 3) Level maturitas SPIP Ditjen PDSPKP berada pada level 3 setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 4) Nilai kinerja PM PRB Ditjen PDSPKP meningkat dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;
- 5) Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP meningkat dari A (84) pada tahun 2020 menjadi A (86,69) pada tahun 2024;
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 7) Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP sebanyak 2 unit setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 8) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Baik (92) pada tahun 2024;
- 9) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP sebesar 1% setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 10) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas strategis lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 70% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 11) Batas tertinggi prosentasi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP bernilai 1 (satu) setiap tahunnya pada tahun 2020- 2024.

### 2.1.5 Kebijakan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan KKP ke-3 yaitu membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan, Ditjen PDSPKP menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
3. Meningkatkan kinerja logistik hasil perikanan
4. Meningkatkan produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing
5. Meningkatkan konsumsi ikan
6. Meningkatkan ekspor hasil perikanan

Dalam melaksanakan 6 (enam) arah kebijakan di atas, Ditjen PDSPKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Di samping itu, Ditjen PDSPKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

Adapun strategi pelaksanaan untuk kebijakan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Usaha dan Investasi adalah:

1. Arah kebijakan “meningkatkan investasi kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
  - a. promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan. Langkah operasional untuk mendukung strategi ini adalah terlaksananya promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
  - b. Tersedianya peluang investasi yang *Ready to Offer*. Strategi ini dilakukan melalui langkah-langkah operasional sebagai berikut:
    - 1) Identifikasi peluang usaha dan investasi dan
    - 2) penyusunan profil peluang investasi.

2. Arah kebijakan “meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
  - a. Fasilitasi kemitraan usaha. Strategi ini dilakukan dengan cara mengembangkan kemitraan usaha, serta fasilitasi pelaku usaha untuk mengakses CSR/PKBL. Langkah-langkah pengembangan kemitraan:
    - 1) Identifikasi pelaku dan permasalahannya;
    - 2) Fasilitasi kemitraan usaha; dan
    - 3) Pendampingan dan monitoring.
  - b. Fasilitasi akses pembiayaan. Kendala utama pembiayaan usaha kelautan dan perikanan diantaranya yaitu: (1) adanya gap informasi pembiayaan, akibat kurangnya informasi akses pembiayaan di sisi pelaku usaha, dan minimnya informasi calon debitur potensial di sisi lembaga pembiayaan; dan (2) Rendahnya literasi keuangan, dimana sebagian besar pelaku usaha kelautan perikanan memiliki literasi keuangan yang rendah. Langkah operasional fasilitasi akses pembiayaan meliputi:
    - 1) penjarangan calon debitur potensial,
    - 2) peningkatan kelayakan usaha,
    - 3) sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan,
    - 4) pendampingan manajemen usaha,
    - 5) peningkatan literasi keuangan, dan
    - 6) pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*).
  - c. Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA). Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
    - 1) Rapat kerja teknis tenaga pendamping usaha; dan
    - 2) Pembinaan tenaga pendamping usaha .
  - c. Pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan. Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
    - 1) Penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan wirausaha;
    - 2) Pembentukan dan penguatan inkubator bisnis; dan
    - 3) Penguatan kelembagaan kelompok menjadi koperasi.
  - d. Fasilitasi digitalisasi usaha. Secara prinsip, digitalisasi usaha adalah mengubah pola komunikasi, interaksi, dan fungsi-fungsi yang ada dalam usaha menjadi digital. Hal ini bersinergi dengan perizinan online karena

menumbuhkan bakat dan minat pelaku usaha untuk berinteraksi secara online. Digitalisasi ini mendukung misi Presiden terkait struktur ekonomi produktif dan berdaya saing menyongsong Revolusi Industri 4.0. Manfaat digitalisasi usaha adalah kerja lebih cepat, efektif, tenaga kerja sedikit, dan jangkauan pelanggan lebih luas.

Langkah-langkah untuk mendorong digitalisasi usaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah:

- 1) pembinaan pemanfaatan teknologi digitalnya;
- 2) membangkitkan ketertarikan bermedia sosial yang sehat;
- 3) bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi bisnis yang ada;
- 4) fasilitasi penyiapan desain website yang menarik (*mobile friendly*);
- 5) inovasi produk selalu diperhatikan;
- 6) pembinaan cara berinteraksi dan memberi pelayanan di media sosial;
- 7) responsif terhadap keluhan pelanggan

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2024. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Perjanjian Kinerja pada Triwulan II mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebijakan terbaru tentang penetapan indikator kinerja pada setiap level. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

**Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Usaha dan Investasi**

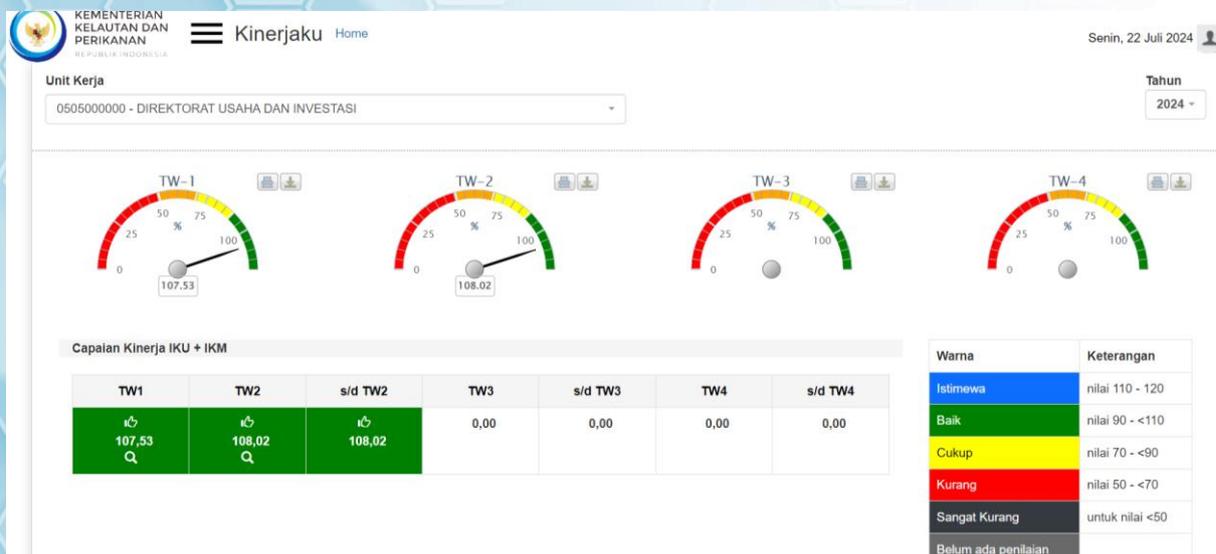
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	1.	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5
		2.	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8
2.	Tersedianya dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i>	3.	Dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i> (Dokumen)	4
3.	Terlaksananya promosi usaha dan investasi	4.	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	4
4.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	5.	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	45

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
5.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	6.	Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	875
		7.	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)	2.565
		8.	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha (UMKM)	125
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	9.	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (Orang)	10.770
7.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi	10.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75
		11.	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	87
		12.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	84
		13.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	100
		14.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	80
		15.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1
		16.	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	94
		17.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	93,75

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja seluruh level lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2024 pada SAPK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 1 Dashboard Nilai NPSS Direktorat Usaha dan Investasi

NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2024 sebesar 108,02%.

Direktorat Usaha dan Investasi pada Tahun 2024 menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan II Tahun 2024, terdiri atas 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja.

**Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja (IK)	Target		Realisasi			
		2024	TW II	TW II	Sd TW II	% thd Target TW II	% sd thd Target 2024
1	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5	-	-	-	-	-
2	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8	-	-	-	-	-
3	Peluang investasi yang ready to offer (Dokumen)	4	1	1	1	100	25
4	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	4	1	2	3	200	75
5	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	45	10	10	14	100	31,11
6	Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina	875	250	250	400	100	45,71
7	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi Pemberdayaan Usaha	2565	600	623	773	103,8	30,17
8	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir	125	34	39	65	114,7	52
9	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan	10770	2650	2721	3827	102,6	35,53
10	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari	75	-	-	-	-	-

	Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)						
11	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	87	75	85,11	85,11	113,4	97,82
12	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	84	-	-	-	-	-
13	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	100	-	-	-	-	-
14	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	80	80	100	100	120	120
15	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1	-	-	-	-	-
16	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	133,3	133,3	120	120
17	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	93,75	-	-	-	-	-

### 3.2.1. Sasaran Strategis 1

**Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan**

**IK1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi**

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan profit atau

keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) selalu berupaya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, Penangkapan Ikan Terukur dan program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Nilai persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi termasuk dalam *outcome* yang harus dicapai Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 5%. Nilai tersebut diperoleh dari persentase selisih pelaku usaha yang melakukan investasi pada tahun sebelumnya dengan tahun ini. Capaian tersebut baru dapat dihitung pada Triwulan IV, hal ini dikarenakan penilaian terhadap persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi baru dilakukan pada akhir tahun.

Untuk memenuhi capaian tersebut pada triwulan II 2024 telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka percepatan peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi. Rapat dilaksanakan pada tanggal 16 April 2024 di Ruang Rapat Direktorat Usaha dan Investasi, rapat dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja lingkup Usaha Direktorat Usaha dan Investasi untuk menghitung capaian indikator jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada periode berjalan. Dari rapat ini Direktur Usaha dan Investasi menyampaikan arahan dalam rangka percepatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan untuk triwulan selanjutnya dan mengevaluasi kinerja investasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dari rapat ini Direktur Usaha dan Investasi menyampaikan arahan dalam rangka percepatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan untuk triwulan selanjutnya dan mengevaluasi kinerja investasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

**Tabel 3. 2 Khtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW I I2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW I 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	
Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	-	5	-	5	-	24,45	-	-	-	-	-	-



Gambar 3. 2 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi

**IK2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program**

Indikator kinerja ini menunjukkan persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), dan skema pembiayaan kredit program lainnya, yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank kepada UMKM hasil kelautan dan perikanan.

Peningkatan pelaku Usaha KP yang mendapatkan kredit program periode tahun 2024 adalah akumulasi pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program periode bulan Januari-Desember 2024. Adapun metode penghitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menghitung realisasi pertumbuhan debitur kredit program pada

periode tahun berjalan yang telah ditetapkan pada target triwulan II 2024 telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program di sektor usaha kelautan dan perikanan pada triwulan II 2024 di Ruang Rapat telah selesai. Perhitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program pada periode berjalan.



target (year on year). Target yang telah ditetapkan pada target triwulan II 2024 telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program di sektor usaha kelautan dan perikanan pada triwulan II 2024 di Ruang Rapat telah selesai. Perhitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program pada periode berjalan.

**Tabel 3. 3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW I 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	
Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	-	8	-	8	-	9,37	-	-	-	-	-	-

Gambar 3. 3 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program

Gambar 3. 4 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program

### 3.2.2. Sasaran Strategis 2

#### Tersedianya Peluang Investasi Yang *Ready to Offer*

#### IK3. Peluang investasi Yang *Ready to Offer*

Dokumen peluang investasi yang *ready to offer* merupakan dokumen yang mengangkat potensi daerah dan peluang investasinya berdasarkan komoditas unggulan dan/atau kawasan/lokasi prioritas, dimana dokumen tersebut sudah siap ditawarkan kepada calon investor (*ready to offer*) karena telah dianalisa tingkat kelayakan investasinya, minimal ditinjau dari aspek (i) legalitas; (ii) finansial; (iii) teknis produksi dan operasional; (iv) sosial ekonomi. Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan (i) identifikasi lokasi/kawasan potensial; (ii) Koordinasi dan pembahasan konsep kajian; (iii) penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* oleh Tim Konsultan; (iv) FGD pengayaan data dan informasi di daerah, dan (v) pendampingan.

**Tabel 3. 4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Peluang investasi Yang *Ready to Offer* Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW I 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	
Peluang investasi yang <i>ready to offer</i>	1	3	-	4	1	3	-	-1	100	25	-	25

Penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* pada triwulan II tahun 2024 telah tercapai 1 (satu) dokumen peluang investasi yang *ready to offer* atau mencapai 100% dari target triwulan II tahun 2024, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 4 dokumen maka persentase capaian Indikator Kinerja Peluang Investasi *ready to offer* baru mencapai 25%.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP antara lain:

1. Survei dan FGD Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Komoditas Tuna di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua

- Kegiatan survei/kunjungan lapangan dan FGD di Biak Numfor, Papua dilaksanakan pada tanggal 12 – 18 Mei 2024 dengan tujuan observasi kondisi lapangan eksisting, pendampingan survei lapang oleh tim ahli penyusun dokumen peluang investasi, koordinasi dengan DKP Kabupaten Biak Numfor terkait penetapan lokasi target investasi, serta sinkronisasi data antar instansi di daerah;
- Kegiatan pengumpulan data dilakukan koordinasi ke beberapa instansi dan stakeholder terkait yaitu BAPPEDA Kab. Biak Numfor, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perhubungan, BPS, PLN, Pelabuhan Pelindo, PT Indo Numfor Pasifik, dan PPI Fandoi;
- Potensi komoditi perikanan tangkap yaitu ikan tuna dan cakalang, ikan kerapu dan berbagai jenis kakap, serta ikan pelagis kecil (layang, tongkol dan kembung). Kawasan industri pengolahan hasil perikanan diarahkan di pusat pusat SSWP, yaitu Distrik Biak Kota, Yendidori, Andei, Pasi, dan Orkeri yang memiliki sentra-sentra komoditas perikanan. Selain itu, pengembangan kawasan pelelangan ikan terdapat di Bosnik, Distrik Biak Timur;
- Hasil kunjungan dan pembahasan dalam FGD disimpulkan bahwa lahan yang diusulkan sebagai lokasi target investasi komoditas tuna (dengan usaha inti berupa Unit Pengolahan Ikan Tuna), yaitu (a) Lahan di kawasan Pelabuhan Biak, dengan status lahan milik Pelindo; (b) Lahan di Manswam, dengan status lahan milik Disperindag Kab. Biak Numfor; (c) Lahan bekas PT. Biak Mina Jaya, dengan status lahan sebagian milik Ibu Yulia (yang rencannya akan dibeli Pemkab Biak Numfor) dan sebagian milik TNI Angkatan Laut; (d) Lahan Waroi di sekitar Kalamo (usulan baru), dengan status lahan milik Masyarakat
- Rekomendasi tindak lanjut antara lain (a) Pemkab Biak Numfor akan segera memberikan informasi tambahan dan data dukung terkait status lahan yang diusulkan sebagai target investasi komoditas tuna; (b) Tim ahli PT. Indekstat Konsultan Indonesia akan segera melakukan analisa pembobotan terhadap 4

lokasi yang diusulkan sebagai target investasi komoditas tuna; (c) Tim teknis Direktorat Usaha dan Investasi, DKP Biak, dan Tim ahli PT. Indekstat Konsultan Indonesia akan melakukan *bench marking* unit pengolahan ikan tuna di Kota Bitung dan sekitarnya; (d) Pemprov Papua dan Pemkab Biak Numfor akan mengkoordinasikan dan mempersiapkan rencana keikutsertaan dalam Indonesia Tuna Investment and Business Forum yang akan dilaksanakan diakhir Juni 2024; (e) Tim ahli PT. Indekstat Konsultan Indonesia harus segera menyusun laporan hasil survei dengan target minimalnya yaitu diketahuinya lokasi target investasi yang paling layak dan jenis produk olahan *value added* yang akan dianalisa kelayakannya yang kemudian dapat ditawarkan kepada calon investor.



Gambar 3. 5 Kunjungan ke OPD lingkup Pemkab Biak Numfor dan Instansi Terkait



Gambar 3. 6 FGD Sinkronisasi Data Potensi dan Peluang Investasi Komoditas Tuna

## 2. *Benchmarking* industri pengolahan tuna di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

- *Benchmarking* informasi industri pengolahan tuna di Kota Bitung, Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 29 – 31 Mei 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk

pengayaan informasi terkait industri hilir tuna dengan melakukan kunjungan ke perusahaan yang bergerak dalam usaha pengolahan ikan tuna;

- Kota Bitung memiliki jumlah unit pengolahan ikan (UPI) tuna yang banyak dan memiliki jenis produk yang sangat variatif serta didukung produksi tuna tahunan yang tertinggi di Indonesia dengan berbagai macam kualitas mutu dan berbagai jenis kapal penangkap;
- Tujuan utama untuk memberikan masukan kepada tim konsultan KKP terkait kelayakan teknis teknologi UPI Tuna di Bitung untuk diterapkan di Biak Numfor, terutama dilihat dari jenis alat dan mesin, bahan baku, dan bahan tambahan;
- Kunjungan UPI pertama dilaksanakan ke PT Carvina Trijaya Makmur. Kegiatan pengolahan utama dari UPI ini adalah *precook* tuna dengan produksi utama yaitu skipjack, loin dan mackarell. Brand yang dimiliki TKS (Tengo Karya Samudra) dan Carvina. PT. Carvina Trijaya Makmur memiliki 4 kapal penangkap ikan dan 7 kapal penampung, dengan tonase paling besar 110 GT dan paling kecil 90 GT. Kapasitas produksi 50 ton per hari untuk loin, sedangkan pengalengan 24.000 kaleng per hari. Jumlah karyawan sebanyak 240 orang. Bahan baku diperoleh dari PT Pathemang Raya (masih owner yang sama). Produk loin diserap oleh PT Delta Pasifik Indotuna.



Gambar 3. 7 Kunjungan UPI PT Carvina Trijaya Makmur

- Kunjungan UPI kedua dilaksanakan ke PT Anping Seafood Indonesia. Pasarnya sampai ke Amerika dan Newzealand. Produksi awal 6 ton per hari karena permintaan terus meningkat saat ini produksi mencapai 10 ton per hari. Perusahaan memiliki fasilitas laboratorium untuk pengujian Histamin dan Mikroba serta Chiller kapasitas 12 ton. Memiliki mitra dengan 14 supplier per orang yaitu nelayan terdiri dari kapal dengan mesin 5-30 GT. Tenaga kerja sebanyak 120 orang. Harga bahan baku tertinggi Rp 62.000 – 65.000 Grade A. PT Anping tidak ada memiliki armada sendiri (bahan baku 100% dari supplier atau membeli dari

luar) dan tidak memiliki pabrik es. Pengiriman ke konsumen via kontainer (40ft atau sekitar 20 ton) ke newzealand 20ft atau 12 ton.



Gambar 3. 8 Kunjungan UPI PT Anping Seafood Indonesia

Gambar 3.6 Kunjungan UPI PT Anping Seafood Indonesia

- Kunjungan UPI ketiga dilaksanakan ke CV Samudera Pangan Indonesia. Saat ini Perusahaan berada dilokasi baru dan operasional tahun 2023. Pasarnya domestik dan Philipine, pada tahun 2024 dbertambah ke Amerika. Sebelumnya pada tahun 2017-2021 pasar tuna ke amerika (pasar utama jepang, amerika, philipine dan singapura) produk utamanya tuna dan cakalang. Hasil tunanya processing sampai beku, produk jadinya steak dan ccl. Kapasitas produksi maksimal sesuai kapasitas ABF yaitu 5 ton, kondisi existing 50% atau 2.5 ton/hari. Bahan baku diambil dari kemitraan, ada 4 kemitraan per orang. Total kapal kemitraan sekitar 15 unit kapal (dari total 4 mitra) 5-30 GT.



Gambar 3. 9 Kunjungan UPI CV Samudera Pangan Indonesia

- Kunjungan UPI terakhir ke PT Samudera Mandiri Sentosa. Salah satu produknya adalah ikan kayu yg diimport ke Jepang (masih dalam bentuk utuh). PT SMS dari tahun 2012, produk pertamanya adalah tuna kaleng dengan penjualan lokal hanya mencapai 5% untuk ikan kaleng dan pouch, untuk pouch cuma satu supplier (pizza hut, dipakai minyaknya). Sisanya ekspor (95%). 1.8 Kg untuk ukuran kaleng besar

yg di ekspor ke Amerika. Kapasitas terpasang 150ton, yg jalan hanya 30-40 ton per hari. Salah satu produknya adalah Frozen Cooked yaitu untuk 1 Kg dan 3 Kg untuk kemasan Pouch. Semua scrub (kepala, tulang dll) diolah menjadi fish mill dan dikirim ke Jakarta.



Gambar 3. 10 Kunjungan UPI PT Samudera Mandiri Sentosa

### 3. Penyusunan dokumen peluang investasi Komoditas Tuna

- Kegiatan dari penyusunan peluang investasi Komoditas Tuna adalah (1) mengidentifikasi kebutuhan investasi dasar dan infrastruktur pendukung usaha komoditas tuna; (2) menyusun analisis kelayakan peluang investasi komoditas tuna; (3) Membuat desain infografis dan leaflet, serta video peluang investasi komoditas tuna yang siap untuk ditawarkan (*ready to offer*).
- Hasil penyusunan dokumen peluang investasi *ready to offer* industri pengolahan ikan tuna terintegrasi di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sebagai berikut:
  - 1) Investasi pengolahan tuna di Kabupaten Biak Numfor layak untuk dilakukan. Skenario yang ditawarkan adalah pembangunan industry pengolahan tuna dengan komposisi pengolahan tuna loin sebanyak 10% dan tuna kaleng 90%. Adapun konsep pemenuhan bahan baku adalah 70% dari penangkapan mandiri oleh perusahaan dan 30% oleh mitra nelayan lokal menunjukkan beberapa indikator yang positif terhadap kelayakan sebuah investasi.
  - 2) Peluang investasi industri pengolahan ikan tuna terintegrasi ini dinilai layak untuk dilakukan dengan justifikasi salah satunya ditinjau dari aspek pasar dimana potensi permintaan domestik ikan tuna mencapai 883 ton setiap tahunnya, sedangkan permintaan pasar global diproyeksikan mencapai nilai 415 juta USD.

- 3) Target produksi tuna loin sebesar 260 ton/tahun dan produksi tuna kaleng sebesar 2.340 ton/tahun. Kebutuhan bahan baku tuna sebesar 5.200 ton/tahun dan bahan tambahan minyak kedelai sebesar 453 ton/tahun. Sumber bahan baku tuna berasal dari hasil tangkapan ikan tuna menggunakan armada kapal maupun dari *supplier* atau mitra nelayan lokal.
- 4) Total investasi senilai Rp 190,20 miliar yang terdiri dari CAPEX Rp68,51 miliar dan OPEX Rp121,69 miliar diproyeksikan memiliki nilai *return on investment* (ROI) sebesar 16,12% dengan *payback period* (PP) 2 tahun 11 bulan. Selain dari aspek finansial, kelayakan investasi tuna di Kabupaten Biak Numfor juga dilihat dari aspek hukum, aspek pasar, aspek teknis, dan aspek sosial budaya.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp241.738.104,- atau setara dengan 21,45% dari total pagu sebesar Rp1.126.953.000,- Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari 21,45% anggaran yang telah terealisasi, telah dicapai realisasi indikator kinerja sebesar 25%.

### **3.2.3 Sasaran Strategis 3**

#### **Terlaksananya promosi usaha dan investasi**

#### **IK4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan**

Kegiatan promosi usaha dan investasi bertujuan untuk menarik minat investasi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan perluasan usaha. Tahapan kegiatan meliputi (i) pemetaan data potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan; (ii) promosi peluang investasi usaha kelautan dan perikanan; dan (iii) pendampingan investasi. Kegiatan Fasilitasi Promosi Peluang Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk: (i) Mempromosikan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan kepada pelaku usaha/calon investor; (ii) Fasilitasi *Investment matching* antara *G to B* yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dengan calon investor dan *B to B* antara perusahaan dengan calon investor.

**Tabel 3. 5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP Triwulan II 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW II 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Promosi Usaha dan Investasi KP (Kegiatan)	1	3	-	4	2	3	1	3	200	100	-	75

Pencapaian kegiatan promosi usaha dan investasi KP pada triwulan II 2024 sebanyak 2 kegiatan dengan persentase 75% dari target tahun 2024. Kegiatan promosi investasi usaha kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan pada triwulan II 2024 sebagai berikut:

1. *Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024*

- Penyelenggaraan IABF 2024 merupakan kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Media Detik, yang dilaksanakan di Hotel Raffles Jakarta pada tanggal 29 April 2024, dan disiarkan secara eksklusif dan *live* di Youtube channel KKP dan *live streaming* di detik.com. Tema yang diangkat adalah "*Sustainable Aquaculture for Food Security and Economic Growth*".
- Kegiatan dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus sebagai *keynote speaker*, dan dihadiri sekitar 400 tamu undangan terdiri dari Duta Besar Vietnam, Kepala Badan Karantina Nasional, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, perwakilan Kedutaan Besar Jepang, Kementerian/Lembaga, Asosiasi, Perusahaan, NGO, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Pejabat Eselon II lingkup KKP.
- Berdasarkan hasil penjaringan minat investasi sektor kelautan dan perikanan terdapat 15 pelaku usaha dengan total rencana investasi mencapai Rp 292 milyar. Komoditas usaha yang diminati adalah Udang (39,3%), Rumput Laut (39,3%), Lobster (42,9%), Nila (21,4%), Kepiting (10,7%) dan dan Komoditas Lainnya (21,4%).



Gambar 3. 11 Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024

## 2. Indonesia Tuna Investment and Business Forum (ITIBF) 2024

- Dalam rangka akselerasi peningkatan investasi dan pengembangan usaha tuna, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelenggarakan Indonesia Tuna Investment and Business Forum (ITIBF) 2024 pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 di Hotel JW Marriott Surabaya.
- Indonesia Tuna Investment and Business Forum 2024 dihadiri oleh 300 peserta secara luring dan 1.242 peserta secara daring pada kanal youtube kkp.go.id, terdiri dari asosiasi, pelaku usaha penangkapan, supplier dan industri pengolahan tuna, calon investor potensial dalam dan luar negeri, perwakilan kedutaan/konsulat negara, Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan akademisi.
- Pada kegiatan ITIBF 2024 telah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama/*Memorandum of Understanding* (MoU) yang terdiri dari:
  - MoU antara Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tentang pemasaran produk tuna.
  - MoU antara USAID Ber-IKAN dengan PT. Rantai Pasok Teknologi (Fishlog), Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Asosiasi Demersal Indonesia (ADI), dan Asosiasi Purse Seine Indonesia (APSI).
  - MoU antara PT. Harta Samudra dengan Kelompok Tuna Yapana dan Kelompok Teluk Labuang tentang pengembangan dan penguatan usaha tuna berkelanjutan, termasuk suplai bahan baku sebanyak 10 ton per bulan per kelompok dengan nilai potensi transaksi dagang sebesar Rp12 Miliar per tahun.
  - MoU antara PT. Bumi Menara Internusa dengan Koperasi Santo Alvin Pratama terkait peningkatan akses pasar produk perikanan, termasuk suplai

bahan baku dengan nilai potensi transaksi dagang sebesar Rp11,9 Miliar per tahun.

- Kontrak dagang antara MIDA Trade Ventures Group dengan Phoenix Seafood - UK, dengan nilai kontrak sebesar USD 3 juta dan volume 300 MT. Phoenix Seafood sangat berminat terhadap tuna Indonesia karena faktor keberlanjutan, konsistensi, kualitas, komitmen dan layanan tuna dari Indonesia.
- KKP memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Wakatobi untuk ikut serta dalam pameran yang menawarkan potensi dan peluang investasi perikanan tuna kepada calon investor dengan total nilai potensi dan peluang investasi yang ditawarkan mencapai Rp 551,12 Milyar.
- KKP juga memfasilitasi kegiatan *investment and business matching*, dengan minat terhadap peluang kerja sama investasi dan pembiayaan usaha perikanan tuna sebesar Rp 1,69 Triliun.



Gambar 3. 12 Indonesia Tuna Investment and Business Forum (ITIBF) 2024

### 3. Pendampingan Minat Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan

- Pendampingan dilaksanakan pada hari Selasa 2 April 2024 di Luminor Hotel Padjadjaran Bogor, Jawa Barat. Kegiatan Pendampingan Minat Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk melakukan pendampingan minat investasi usaha kelautan dan perikanan yang terjaring pada kegiatan *Indonesia Marine and Fisheries Business Forum (IMFBF) 2024*, yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2024 di Hotel Fairmont Jakarta;
- Kegiatan pendampingan diperoleh hasil sebagai berikut

- a. HPPI berkeinginan untuk melakukan investasi pada bidang usaha penangkapan udang yang terintegrasi dengan pembekuan udang, namun HPPI mengalami beberapa kendala, yaitu 11 kapal penangkap udang eks asing dengan alat tangkap jaring hela udang terkena moratorium dan berhenti beroperasi berdampak pada kerusakan mesin pendingin dan mengakibatkan *slow freezing* yang dapat menurunkan kualitas udang dan tidak sesuai kualitas ekspor. Setelah diperbolehkan beroperasi kembali, tidak semua kapal memiliki *processing plant* dan udang yang diproduksi dari kapal tidak bisa memperoleh HACCP/SKP sebagai syarat penerbitan *Health Certificate* untuk ekspor, menyebabkan biaya yang tinggi karena menggunakan izin perusahaan lain (*undername*).
- b. ARPI berminat untuk investasi pada bidang usaha pembekuan ikan dengan menawarkan peluang kerja sama pada pembangunan dan pemeliharaan *cold chain system (software & hardware)*, transportasi berpendingin, dan jasa pengiriman/kurir berpendingin. ARPI dan KKP dapat berkolaborasi untuk pengembangan *cold chain system* di lokasi-lokasi-lokasi tambak udang berupa pabrik es untuk lokasi yang memiliki ketersediaan infrastruktur/air tawar yang memadai, dan *ice storage* untuk lokasi-lokasi tambak. ARPI mendorong pembangunan *Integrated Cold Storage* dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk menjangkau daerah terpencil yang tidak hanya mengandalkan energi listrik PLN;
- c. PT. Mahakarya Maritim Indonesia menawarkan peluang kerja sama untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru;
- d. PT. Anugerah Mina Sejahtera berminat untuk investasi pada bidang usaha pembekuan ikan. Perusahaan sedang menjajaki untuk melakukan ekspansi usaha/relokasi usaha mendekati sumber daya seperti Serang, Banten;



Gambar 3. 13 Pendampingan Minat Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan di Bogor

4. Pendampingan rencana investasi dari Brunei Darusalam (ATPD SDN BHD – Future JV In Indonesia)

- Rapat koordinasi dilaksanakan pada hari Selasa, 7 Mei 2024 di Ruang Rapat Direktorat Usaha dan Investasi. Tujuan rapat ini adalah koordinasi kebijakan investasi perikanan tangkap dan pendampingan rencana investasi dari Brunei Darusalam (ATPD SDN BHD – Future JV In Indonesia)
- ATPD SDN BHD – Future JV In Indonesia adalah calon investor dari Brunei Darusalam yang ingin berinvestasi di bidang perikanan tangkap. Perusahaan ini memiliki sekitar 120 kapal penangkapan yang siap dioperasikan di Indonesia apabila diizinkan oleh Pemerintah RI. Adapun lokasi penangkapan yang menjadi target mereka yaitu di Laut China atau di WPP 711, dengan target komoditas utama yaitu ikan tuna.

- Beberapa hal yang perlu ditekankan terkait rencana investasi di bidang perikanan tangkap, antara lain:
  - a. Harus memiliki perusahaan di Indonesia atau *joint venture*
  - b. Nilai investasi minimal Rp10 Milyar tiap KBLI
  - c. Apabila akan menggunakan kapal impor maka ukurannya minimal 150 GT per kapal
  - d. Kepemilikan kapal harus atas nama orang atau badan usaha Indonesia
  - e. Proses pengadaan kapal impor melibatkan 3 instansi yaitu KKP, Kemendag, dan Kemenhub



Gambar 3. 14 Pendampingan rencana investasi dari Brunei Darusalam (ATPD SDN BHD – Future JV In Indonesia)

#### 5. Pendampingan Investasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

- Rapat Audiensi dan Pendampingan Investasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Usaha dan Investasi. Rapat dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi, dengan peserta dari : Ketua Bidang Maritim HIPMI (Bpk Fathul Nugroho) beserta tim, Katimja Investasi, dan perwakilan dari Direktorat Logistik.
- HIPMI berminat berinvestasi untuk pengembangan usaha di bidang perdagangan ekspor, budidaya *offshore*, selanjutnya pengolahan ikan. HIPMI tertarik utk mengembangkan usaha pemasaran ikan teri (ikan bilis), hasil budidaya ikan kerapu dan Napoleon (sedanau) utk pasar Singapura.
- HIPMI telah memiliki kerjasama dgn pelaku usaha di Singapura untuk pemasaran dan teknologi budidaya ikan. HIPMI berencana membuat usaha budidaya *offshore* dengan komoditas utama: udang windu dan kerapu, dengan calon lokasinya di Kota Batam. HIPMI telah menginisiasi usaha pengolahan ikan dengan

pengembangan prototipe produk pindang tengiri kaleng berjumlah 1000 unit di tahun 2023.

- Dit. Pemberdayaan Usaha siap mendampingi perizinan usaha budidaya, sinergi dengan DJPB dan Ditjen PRL. Sebelum menjalankan usaha pemasaran ikan bilis, harus dipastikan dulu kualitas ikan bilis yang diminta calon buyer di Singapura. Rencana investasi pengembangan usaha pemasaran ikan bilis akan diarahkan untuk bermitra dengan pengelola sentra ikan teri di Kalamo Pulau Pasaran.



Gambar 3. 15 Pendampingan Investasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

#### 6. Pendampingan Minat Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan dengan PT. Evergreen Agriculture

- Rapat fasilitasi dan pendampingan minat investasi PT. Evergreen Agriculture dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2029 di Ruang Direktur Pemasaran, Gd. Mina Bahari III, Lt.13. Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Pemasaran dan diikuti oleh Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Pemasaran, Direktorat Pengolahan, serta perwakilan dari PT. Evergreen Agriculture (China).
- PT. Evergreen Agriculture merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agriculture pertanian dan perikanan. Saat ini komoditas perikanan yang diolah oleh perusahaan tersebut masih terbatas pada budidaya dan pengolahan komoditas udang. Menindaklanjuti hasil kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan di pabrik PT. Evergreen Agriculture di China, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyampaikan peluang investasi pengembangan industri udang secara terintegrasi dari hulu ke hilir. PT. Evergreen Agriculture tertarik untuk ekspansi perusahaannya ke Indonesia karena harga baku udang dari negara kita jauh lebih murah dibandingkan dengan yang dari China. Selain komoditas udang, perusahaan tersebut juga pernah ditawarkan peluang investasi tuna di Kabupaten

Biak Numfor dan usaha pengolahan ikan di Kota Tual (sebagai lokus pilot project Penangkapan Ikan Terukur).

- Selain tertarik pada komoditas udang dan tuna, PT. Evergreen Agriculture juga menyatakan minat investasi pada usaha : budidaya tilapia, rumput laut, siput laut, dan usaha pendukung seperti : pengolahan hasil perikanan, pabrik pakan ikan, dan perbenihan ikan/udang.
- Pada kesempatan ini, perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi merekomendasikan agar PT. Evergreen Agriculture melakukan investasi secara terintegrasi dari hulu hingga hilir dan menerapkan prinsip *green investment* atau *zero waste*. Investasi usaha terintegrasi bertujuan agar ketersediaan bahan baku lebih terjamin dan menghindari konflik perebutan bahan baku dengan perusahaan eksisting. Selain itu, ikan bahan baku produksi sendiri lebih mudah untuk mengontrol kapasitas produksi, kualitas ikan, dan frekuensi panen.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp1.212.755.389,- atau setara dengan 53,74% dari total pagu sebesar Rp2.256.532.000,- Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dimana dari 53,74% anggaran yang telah terealisasi, telah tercapai realisasi indikator kinerja dengan nilai persentase sebesar 75%.

#### **3.2.4 Sasaran Strategis 4**

**Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan**

##### **IK5. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)**

Dalam rangka memperkuat sinergi untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan Indonesia melalui pengembangan peran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pada tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 10/MEN-KP/KB/VIII/2021 dan 17/KB/M.KUKM/VIII/2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Ditjen PDSPKP menindaklanjutinya dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM tentang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bagi koperasi dan UMKM yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2021. Salah satu wujud sinergi program yang dilaksanakan yakni mendorong UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk dapat naik kelas melalui peningkatan kapasitas kelembagaan usaha, dari semula berbentuk kelompok usaha pengolah dan pemasar (Poklahsar) menjadi lembaga berbadan hukum koperasi. Diharapkan dengan terbentuknya koperasi maka poklahsar dapat mencapai skala ekonomi yang lebih menguntungkan, memiliki kekuatan hukum sehingga dapat mengakses pembiayaan serta meningkatkan posisi tawar dalam bermitra dengan pelaku usaha lain.

Pada Indikator kinerja ini yang dimaksud Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya adalah Lembaga usaha yang difasilitasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan. Pada tahun 2024 kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan dilakukan kepada lembaga usaha dengan kategori: 1) lembaga usaha non formal (kelompok pengolah dan pemasar) menjadi lembaga usaha formal/berbadan hukum, 2) lembaga usaha berbadan hukum namun perlu dilakukan penguatan kembali karena mendukung program tertentu seperti korporasi nelayan, klaster daya saing, kampung nelayan maju, kampung budidaya, Inkubator Mina Bisnis dan program lainnya.

**Tabel 3. 6 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan II 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW I I2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW II 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	
Lembaga Usaha Hasil KP yang Ditingkatkan kapasitasnya)	10	22	6	45	10	22	6	14	100	45,45	166,66	31,11

Target Lembaga usaha yang ditingkatkan dan dibina kapasitas kelembagaannya pada tahun 2024 sebanyak 45 lembaga, sedangkan target pada triwulan II tahun 2024 adalah sebanyak 10 lembaga. Realisasi capaian jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya pada triwulan II tahun

2024 adalah 10 lembaga usaha, hal ini sesuai target dan telah mencapai 100%, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 maka realisasi lembaga usaha hasil KP yang telah ditingkatkan sampai dengan triwulan II sebesar 31,11%. Capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun 2023 tercapai 166,66%. Adapun lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya pada triwulan II Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah dilakukan pada triwulan II, antara lain:

**a) Peningkatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan di Tuban-Jawa Timur pada tanggal 4 April 2024**

1. Kegiatan bertujuan untuk mendukung program peningkatan kelembagaan usaha di lokasi Kampung Nelayan Modern yang menjadi program prioritas kementerian kelautan dan perikanan tahun 2024.
2. Pada saat kegiatan dijelaskan tentang tata cara pembentukan koperasi dan fasilitasi pembentukan koperasi berupa pembayaran akta notaris oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan khususnya Direktorat Usaha dan Investasi.
3. Calon koperasi desa Bulumeduro Tuban memiliki calon anggota yang terdiri dari 7 KUB dan 12 Poklamsar dengan jumlah anggota seluruhnya berjumlah 96 orang.
4. Rencana pengembangan usaha koperasi bulumeduro Tuban akan mengelola aset sentra kuliner yang merupakan bantuan pemerintah dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan khususnya dari Direktorat Pemasaran.
5. Sentra kuliner akan dibangun berdampingan dengan *coffee shop* dan mini market yang telah dikelola oleh Bumdes Bulumeduro.
6. Tindak lanjut dari kegiatan peningkatan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan ini adalah percepatan pembentukan koperasi bulumeduro sehingga dapat mengelola bantuan pemerintah yang akan diberikan kepada Desa Bulumeduro selaku lokasi Kampung Nelayan Modern.



Gambar 3. 16 Peningkatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan di Tuban- Jawa Timur tanggal 4 April 2024

#### **b) Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sragen 7 Mei 2024**

1. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024 di Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Mulya Kabupaten Sragen, yang dihadiri oleh Tim Kerja Kelembagaan- Direktorat Usaha dan Investasi, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sragen, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen, Penyuluh Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Koperasi Kabupaten Sragen, serta Perwakilan dari Kelompok Mulya.
2. Menindaklanjuti Rapat Persiapan Inisiasi Pembentukan Badan Usaha pada tanggal 26 Januari 2024 maka perlu dikoordinasikan dengan stakeholder terkait kesiapan Kelompok Mulya membentuk badan usaha.
3. Ketua Kelompok Mulya menyampaikan kesulitan dalam usahanya yaitu pemasaran dan berencana mendirikan koperasi untuk mengatasi masalah tersebut. Merekrut anak muda untuk dipersiapkan dalam pengelolaan manajemen koperasi.
4. Dinas Koperasi di wilayah Kabupaten sragen terdapat 1167 koperasi yang sudah terbentuk, 226 koperasi yang aktif. Dari Jumlah tersebut hanya terdapat 2 koperasi perikanan termasuk calon koperasi Mulya. Dari hal tersebut dapatdiketahui bahwa banyak koperasi yang sudah terbentuk tetapi sudah tidak aktif, untuk itu diharapkan calon koperasi Mulya dapat menjadi koperasi yang aktif dan mampu mensejahterakan anggota.
5. Tanggal 26 february 2024 telah dilaksanakan rapat pembentukan koperasi oleh kelompok Mulya dengan agenda pembahasan diantara: menentukan nama koperasi,

alamat koperasi, jenis usaha koperasi, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, susunan pengurus dan masa kerja pengurus, dan AD/ART. Saat ini berkas-berkas usulan pembentukan koperasi sudah dinotaris, masih dalam pengajuan nama di kemenkumham.

6. Disarankan agar pengurus membuat formulir anggota yang memuat hak dan kewajiban dan di tandatangani seluruh anggota koperasi.



Gambar 3. 17 Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sragen 7 Mei 2024

### c) Rapat Prapendirian Koperasi Di Kabupaten Serang 22 Mei 2024

1. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 di ruang rapat Dinas Perikanan Kabupaten Serang, yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Serang, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang, perwakilan calon koperasi kabupaten Serang, penyuluh perikanan kabupaten serang dan penyuluh koperasi kabupaten serang.
2. Calon koperasi Kabupaten Serang terdiri dari 3 kelompok antara lain Poklahsar Bahari Maju Bersama Kabupaten Serang, Poklahsar Mekar Sari Jaya Bahari Kabupaten Serang, KUB Bahtera Jaya Kabupaten Serang
3. Profil Bahari Maju Bersama, sebagai berikut:

- Nama Kelompok : Bahari Maju Bersama
- Tahun Berdiri : 2024
- Provinsi : Banten
- Kab/Kota : Serang
- Alamat : Kp. Larangan, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu
- Nama Ketua : Fathurohim
- No Telp Ketua/Pengelola : 087871301874
- Ijin/Sertifikat Usaha : NIB
- Jumlah Anggota : 25 Orang
- Jenis Usaha Anggota\* : (Nelayan/Budidaya/Pengolah/Pemasar)
- Produk Utama : Pindang
- Harga Produk (Rp./unit) : 8.000/ekor
- Asal Bahan Baku : Dalam Provinsi Banten
- Rata-rata Volume Produksi (Kg/Bulan) : 2.340
- Rata-rata Omzet (Rp/Bulan) : 18.720.000
- Modal Usaha : 20.000.000
- Lokasi Pemasaran\* : (Lokal/Antar Kab-Kota/Antar Provinsi/Ekspor)
- Rencana Pengembangan Usaha : Meningkatkan jumlah produksi dan memperluas pasar dan penjualan
- Maksud dan tujuan pendirian koperasi : Untuk mengembangkan usaha, mensejahterakan anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya, membantu perekonomian masyarakat
- Kendala Usaha : Diwaktu waktu tertentu kesulitan mendapatkan bahan baku karena stok yang tidak ada dan kekurangan modal

4. Profil Mekar Sari Jaya Bahari, sebagai berikut:

- Tahun Berdiri : 2024
- Provinsi : Banten
- Kab : Serang
- Alamat : Kp. Lontar Desa Lontar Kecamatan Tiratyasa Kab Serang
- Nama Ketua : Sauri
- No Telp Ketua/Pengelola : 087771671103
- Ijin/Sertifikat Usaha : NIB

- Jumlah Anggota : 25 orang
- Jenis Usaha Anggota\* : (Nelayan/Budidaya/Pengolah/Pemasar)
- Produk Utama : Surimi, Getas Bandeng, Terasi, Dendeng
- Harga Produk (Rp./unit) : 35.000/kg
- Asal Bahan Baku : Dalam Provinsi Banten
- Rata-rata Volume Produksi (Kg/Bulan) : 400Kg/Bulan
- Rata-rata Omzet (Rp/Bulan) : Rp. 12.000.000
- Modal Usaha : 30.000.000
- Lokasi Pemasaran : (Lokal/Antar Kab-Kota/Antar Provinsi/Ekspor)
- Rencana Pengembangan Usaha : Untuk menambah jumlah produksi, omzet dan pelebaran pasar.
- Maksud dan tujuan pendirian koperasi : Membantu pemerintah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat disekitarnya.
- Kendala Usaha : Kurangnya bahan baku dan modal untuk pengembangan usaha

5. Profil Bahtera Jaya, sebagai berikut:

- Tahun Berdiri : 2024
- Provinsi : Banten
- Kab/Kota : Serang
- Alamat : Kp. Sukadiri Desa Lontar Kec. Tiratayasa Kabupaten Serang
- Nama Ketua : Piyan
- No Telp Ketua/Pengelola : 083812564864
- Ijin/Sertifikat Usaha : -
- Jumlah Anggota : 25 Orang
- Jenis Usaha Anggota\* : (Nelayan/Budidaya/Pengolah/Pemasar)
- Produk Utama : Ikan Hasil Tangkapan (Kembung, Kue, Layang, Rajungan dll)
- Harga Produk (Rp./unit) : 25.000/kg
- Asal Bahan Baku/Wilayah Tangkapan : Dalam Provinsi Banten
- Rata-rata Volume Produksi (Kg/Bulan) : 480
- Rata-rata Omzet (Rp/Bulan) : 12.000.000

- Modal Usaha : 50.000.000
- Lokasi Pemasaran\* : (Lokal/Antar Kab-Kota/Antar Provinsi/Ekspor)
- Rencana Pengembangan Usaha : Mengembangkan sarana dan prasana serta kemandirian pelaku usaha
- Maksud dan tujuan pendirian koperasi : Menjadi wadah untuk memajukan pelaku utama pelaku usaha, mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitar
- Kendala Usaha : Faktor alam dan cuaca yang tidak menentu dan kadang kurang bersahabat serta kurangnya alat tangkap dan sarana prasana yang digunakan
- pelaku utama pelaku usaha KP



Gambar 3. 18 Rapat Prapendirian Koperasi Di Kabupaten Serang 22 Mei 2024

**d) Rapat Inisiasi Pembentukan Badan Usaha tanggal 4 dan 6 Juni 2024 Kabupaten Kendal**

1. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2024 secara hybrid dan secara luring pada tanggal 6 Juni 2024 di Rumah Produksi Sambal Seafood Bam's Desa

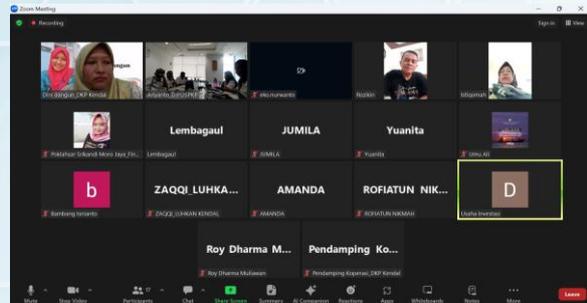
Gempolsek. Rowosari Kab. Kendal, yang dihadiri oleh Tim Kerja Kelembagaan Direktorat Usaha dan Investasi, perwakilan Dinas perikanan Kab. Kendal, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal, Penyuluh Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Koperasi Kabupaten Kendal, serta Kelompok calon anggota koperasi

2. Berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal menyampaikan beberapa hal yaitu:

- Ada 15 usulan Poklhasar yang akan bergabung menjadi koperasi;
- Dari 15 poklhasar calon anggota koperasi tersebut sudah melakukan kegiatan yang merupakan embrio dari kegiatan koperasi yaitu kegiatan pemasaran produk melalui website pasar laut yang sudah berjalan selama 2 tahun
- Website Pasar laut memfasilitasi kegiatan pemasaran para anggota poklhasar dan nantinya akan menjadi sub kegiatan koperasi
- Selain menjadi *offtaker* bagi para anggotanya, koperasi nantinya akan menjadi penyedia bahan baku produksi dan penyedia bahan kemasan
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal akan membantu pendampingan terkait administrasi koperasi dan pengawasan koperasi.
- Calon anggota koperasi sudah melakukan ksetoran simpanan wajib yang sudah mulai dilakukan pada awal juli 2024
- Kabupaten Kendal mendapat bantuan DAK bedah UPI pada tahun 2024 yang berada di jalur wisata yang nantinya akan diperuntukan sebagai outlet pemasaran produk yang dihasilkan anggota
- Koperasi, nanti selain memberikan pelayanan bagi anggota juga akan melayani masyarakat namun dengan harga yang tidak sama
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal juga memiliki kegiatan pendampingan untuk merk dagang dan TKDN.

3. Informasi dari Dinas Koperasi, bahwa di Kabupaten Kendal terdapat 610 Koperasi dan hanya 254 koperas yang melakukan RAT. Sebagian besar dari koperasi tersebut bergerak di jasa keuangan.

4. Mengingat banyaknya anggota dari keseluruhan kelompok, maka perlu dipastikan apakah semua anggota kelompok akan menjadi anggota koperasi. Dan sehubungan dengan tersebarnya kelompok di beberapa desa, nantinya untuk wilayah Barat akan ada sekretariat/perwakilan di daerah gempol sewu, dan wilayah timur di poklahasar srikandi moro jaya



Gambar 3. 19 Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Kabupaten Kendal

#### e) **Koordinasi Para Pihak Dan Bimtek Peningkatan Usaha Rumput Laut Berbasis Klaster Ekonomi Di Kabupaten Serang tanggal 20 Juni 2024**

Dalam rangka menindaklanjuti pengembangan usaha dan peningkatan kelembagaan usaha rumput laut di Kabupaten Serang-Provinsi Banten, Direktorat Pemberdayaan Usaha bekerjasama dengan Dit. Pelayanan Investasi DTT-Kemendes telah melaksanakan Koordinasi Para Pihak dan Bimtek Peningkatan Usaha Rumput Laut Berbasis Klaster Ekonomi Di Kabupaten Serang yang dilaksanakan di Gedung Unit Pelayanan Perikanan Terpadu (UPPT) Pontang. Jl. Raya Kubang Puji – Pontang, Desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang pada tanggal 20 Juni 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pertemuan Koordinasi Para Pihak dan Bimtek Peningkatan Usaha Rumput Laut Berbasis Klaster Ekonomi Di Kabupaten Serang dihadiri oleh Asisten Bidang Ekonomi Sekda Kabupaten Serang, Direktur Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi-Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi-Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktur Pengolahan dan Bina Mutu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Dinas Perikanan Kabupaten Serang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Serang, Direktur PT. Winner Perkasa Indonesia Unggul, Kelompok Subur Makmur (mitra PT. Agarindo Bogatama), Direktur Bumdesma Tirtayasa, Camat Pontang, Camat Tirtayasa, perwakilan perangkat Desa Lontar dan Desa Tengkurak dan para pembudidaya rumput laut. Pertemuan ini merupakan langkah awal dalam memfasilitasi para pelaku usaha dalam pengembangan usaha rumput laut melalui penguatan kelembagaan dan kemitraan.
2. Pertemuan dibagi dalam 3 *desk* dan dilaksanakan secara paralel, yaitu pertemuan koordinasi lintas sektor, pendampingan penguatan kelembagaan dan kemitraan untuk pelaku usaha, dan *business matching* antara calon *off-taker* dengan pelaku usaha budidaya rumput laut.
3. Dalam sesi pendampingan bimtek pelaku usaha, menghadirkan praktisi rumput laut sekaligus calon *off taker* dan melibatkan beberapa narasumber, yaitu perwakilan dari PT. Winner Prakasa Unggul Indonesia dan Kelompok Subur Makmur (mitra PT. Agarindo Bogatama), Direktorat Pengolahan, Direktorat Usaha dan Investasi, dan Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Topik yang disampaikan oleh para narasumber yaitu teknik budidaya dan penanganan pasca panen rumput laut, pola dan bentuk kemitraan usaha pada bidang kelautan dan perikanan serta pengembangan ekonomi dan investasi desa melalui badan usaha milik desa (BUM Desa).
4. Adapun pokok hasil pertemuan 3 *Desk* dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Secara produksi, komoditas utama rumput laut di Kabupaten Serang adalah *Gracilaria* sp. dan *Euचेuma cottonii* dengan volume produksi pada tahun 2023 mencapai 38,15 ton untuk *Gracilaria* sp. dan 13,31 ton untuk *Euचेuma cottonii* yang dihasilkan dari lahan seluas 1.250 ha atau 24,87%

dari keseluruhan lahan potensi budidaya perikanan. Usaha produksi rumput laut tersebut dilakukan dengan metode polikultur dengan bandeng dan udang.

- b. Permasalahan rumput laut di Kabupaten Serang meliputi ketersediaan bibit dan teknis budidaya, penanganan dan pengolahan pasca panen (diversifikasi), ketersediaan gudang untuk menampung hasil panen, pemasaran dan tataniaga, lingkungan (infrastruktur, ekosistem), serta kelembagaan dan kemitraan
- c. Di dalam forum telah disepakati bahwa permasalahan utama tersebut akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya, beberapa diantaranya adalah :
  - Pada aspek perbaikan teknik budidaya dan penyediaan bibit rumput laut, Dinas Perikanan Kabupaten Serang akan bersinergi dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dan penyuluh perikanan untuk penyediaan bibit (skala terbatas) dan pendampingan budidaya rumput laut kepada pelaku. Hal ini termasuk bagaimana pengaturan salinitas air secara efektif dan efisien.
  - Pada aspek perbaikan pasca panen, Dinas Perikanan bersama PT. Winner Perkasa dan Kelompok Subur Makmur siap dilibatkan untuk pendampingan pengolahan pasca panen agar produk rumput laut kering yang dihasilkan dapat memenuhi kualifikasi Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL). Saat ini, karena tidak memenuhi kualifikasi, maka harga jual *Gracilaria* sp. kering masih rendah (berkisar Rp.2.500 – Rp.3.500).
  - Terkait permasalahan ketersediaan Gudang pasca panen, KKP dan Kemendes akan memfasilitasi pembahasan pemanfaatan bangunan yang merupakan aset desa (belum dimanfaatkan) sebagai sarana gudang dan pengeringan. Para pihak yang akan terlibat adalah Bumdesma Tirtayasa, PT. Winner Perkasa Indonesia Unggul, dan pelaku usaha. Detail kesepakatan dan teknis kerjasama para pihak terkait hal tersebut akan dibahas lebih lanjut. Sebagai langkah awal persiapan rehabilitasi bangunan, Ditjen PDSPKP, dalam hal ini Direktorat PBM akan melakukan pendampingan dalam perencanaan layout UPRL agar alur produksi sesuai dengan standar UPRL.

- Untuk mendukung peningkatan akses pasar melalui penguatan kelembagaan dan kemitraan, selama pertemuan berlangsung, juga dilakukan *business matching* antara PT. Winner Perkasa Indonesia Unggul, Kelompok Subur Makmur (mitra PT. Agarindo Bogatama) dan Bumdesma Tirtayasa dengan para pelaku usaha pembudidaya rumput laut.
- Direktur PT. Winner Perkasa Indonesia Unggul menyampaikan kesediannya untuk membeli *Gracilaria* sp. sepanjang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan UPRL, yaitu kadar air rumput laut di bawah 20% dan bersih (tanpa pengotor). Namun demikian, *sample* produk rumput laut kering yang dibawa para pembudidaya rumput laut belum ada yang memenuhi kualifikasi.
- Pada kesempatan yang sama, sekaligus juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Usaha Rumput Laut yang Berkelanjutan antara PT. Winner Perkasa Indonesia Unggul, Kelompok Subur Makmur (mitra PT. Agarindo Bogatama) dan Bumdesma Tirtayasa dengan para pelaku usaha pembudidaya rumput laut. Dalam nota kesepahaman tersebut masing-masing pihak sepakat untuk mendapatkan kepastian pasar dan memenuhi kebutuhan bahan baku rumput laut sesuai kualifikasi UPRL.





Gambar 3. 20 Koordinasi Para Pihak Dan Bimtek Peningkatan Usaha Rumput Laut Berbasis Klaster Ekonomi Di Kabupaten Serang tanggal 20 Juni 2024

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp399.367.713,- atau setara dengan 21,59% dari total pagu sebesar Rp1.850.000.000,- Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 31,11% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 21,59%.

### 3.2.5 Sasaran Strategis 5

**Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha**

#### **IK6. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)**

Penumbuhan dan pembinaan wirausaha hasil KP dilaksanakan dalam rangka mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan pembinaan terhadap wirausaha bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya mendukung peningkatan rasio

kewirausahaan serta keberlanjutan usaha wirausaha baru dan wirausaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini terlaksananya fasilitas pendampingan dan pembinaan UMKM sektor hasil kelautan dan perikanan.

Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan dibina pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 875 wirausaha, pada triwulan II tahun 2024 target yang ditetapkan sebanyak 250 UMKM/wirausaha. Realisasi capaian pada TW II yaitu sebanyak 250 UMKM/Wirausaha atau setara dengan 100% terhadap target, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah sebesar 45,71%. Capaian kewirausahaan tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian di periode yang sama pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 38,89 %, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 capaian wirausaha yang terealisasi sebanyak 180 UMKM sedangkan pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 250 UMKM.

**Tabel 3. 7 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW II 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	
Wirausaha Hasil KP yang Ditumbuhkan dan Dibina (UMKM)	250	533	180	875	250	553	180	400	100	75,04	138,88	45,71

Untuk mendukung capaian tersebut, kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II tahun 2024, meliputi:

1. Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Mojokerto dilaksanakan pada tanggal 24-25 April 2024 kepada UMKM Dua Bersaudara dan UMKM Arum Sari. Berdasarkan hasil pendampingan diketahui permasalahan yang dihadapi oleh kedua UMKM diantaranya ketersediaan supply gas terbatas sehingga produksi terhambat Ketika suplay bahan baku berlimpah, permasalahan permodalan untuk pengembangan usaha dan Kedua UMKM belum memiliki pencatatan pembukuan keuangan, sehingga belum tersedia laporan keuangan yang tercatat secara rutin. Tindak lanjut yang diperlukan adalah berdiskusi dengan Pertamina, berkoordinasi

dengan LPMUKP untuk permodalan dan melaksanakan kegiatan bimtek penyusunan laporan keuangan.



Gambar 3.22 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Wirausaha Hasil KP di Mojokerto

2. Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Probolinggo dilakukan kepada kepada UMKM Kembang Sari dan UMKM Pradipta Jaya Food pada tanggal 25-26 April 2024. Hasil kurasi diketahui permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Probolinggo yaitu UMKM Kembang Sari membutuhkan akses perluasan pasar, sementara untuk Pradipta Jaya Food memerlukan branding produk agar dapat dikenal luas. Saat ini penjualan produk abon ikan menurun, hal ini disebabkan produk abon ikan tidak lagi boleh mencantumkan sebagai produk pangan untuk bayi karena SNI secara umum adalah produk abon ikan. Untuk mengatasi permasalahan akan dilakukan diskusi dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu untuk penyelesaian permasalahan SNI produk abon ikan.



Gambar 3. 21 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Wirausaha Hasil KP di Probolinggo

3. Kegiatan pendampingan wirausaha di Kota dan Kabupaten Semarang dilakukan kepada 5 UMKM yaitu UMKM Bandeng Abimanyu, UMKM Bandeng Dua Puluh Dua

Puluh, UMKM Bandeng Alam Berkah, UMKM Bandeng Presto 27 dan UMKM CV Kairos Visi Pratama. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada tanggal 16-18 Mei 2024 dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan usaha dalam rangka mendorong UMKM naik kelas. Hasil identifikasi UMKM diketahui kendala ketersediaan bahan baku bandeng secara kontinyu dan perluasan akses pasar. Saat ini produk hanya dipasarkan di wilayah Semarang dan sekitarnya. Untuk membantu pemenuhan bahan baku bandeng akan ditindaklanjuti dengan fasilitasi kemitraan dengan pembudidaya bandeng, sementara untuk perluasan pasar akan dilakukan fasilitasi kemitraan dengan shopee dan KAI.



Gambar 3. 22 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Wirausaha Hasil KP di Semarang

4. Kegiatan pendampingan wirausaha kelautan dan perikanan di Kota Pasuruan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2024 dan dihadiri oleh 40 UMKM pengolah hasil perikanan. Pertemuan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan UMKM naik kelas sekaligus mengkurasi UMKM untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha. Hasil kurasi diketahui seluruh pelaku usaha sudah memiliki NIB dan PIRT, 4 UMKM produknya sudah tersertifikasi halal, 4 UMKM yang sudah memiliki dapur terpisah sementara sisanya masih bersatu dengan dapur keluarga. Sementara untuk laporan keuangan hanya 3 pelaku usaha yang sudah menyusun laporan keuangan sederhana, sisanya belum memiliki laporan keuangan karena belum pernah dilatih cara menyusun laporan keuangan, serta 2 UMKM telah mendapatkan akses pembiayaan yaitu KUR. Tindak lanjut hasil kurasi, UMKM Kota Pasuruan akan diundang dalam rangkaian kegiatan Workshop Pemberdayaan Usaha.



Gambar 3. 23 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Wirausaha Hasil KP di Kota Pasuruan

5. Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Bogor dilaksanakan kepada 16 UMKM yang merupakan pelaku usaha perikanan yang baru dilakukan pendampingan oleh Dinas Perikanan dan Perternakan Kabupaten Bogor. Dari hasil pendampingan diketahui permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yaitu mahalnya bahan baku ikan karena bukan berasal dari pembudidaya langsung sehingga menyebabkan harga jual produk menjadi lebih mahal, akses pasar yang terbatas dimana saat ini penjualan produk baru sebatas di wilayah sekitar Kabupaten dan Kota Bogor serta kemasan produk yang masih sangat sederhana. Untuk itu perlu di fasilitasi kemitraan dengan pemilik bahan baku sekaligus kemitraan dengan supplier untuk memperluas akses pasar.



Gambar 3. 24 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Wirausaha Hasil KP di Kabupaten Bogor

6. Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Sampang dilakukan pada tanggal 24-26 Juni 2024. Kegiatan pendampingan dilakukan kepada CV. Jeeva Bumi Nusantara dimana perusahaan ini memiliki rencana pengembangan usaha yaitu dengan melakukan ekspor rumput laut kering sendiri, saat ini masih menggunakan nama perusahaan lain. Untuk pemenuhan pasokan bahan baku, pihak perusahaan saat ini sedang merencanakan investasi pengembangan budidaya rumput laut gracillaria di Sampang dan budidaya rumput laut cottonii di Bangkalan, Madura. Saat ini perusahaan sedang melakukan ujicoba polikultur dengan rumput laut jenis gracilaria, hasil pertumbuhan sangat baik. Pembudidaya sangat antusias rencana

pengembangan rumput laut sebagai salah satu tambahan sumber pendapatan. Bupati Sampang menyatakan dukungan penuh atas rencana investasi yang akan dilakukan CV. Jeeva dan berharap dukungan penuh dari KKP untuk membangun masyarakat perikanan di Sampang.



Gambar 3. 25 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Wirausaha Hasil KP di Kab Sampang

7. Kegiatan penciptaan wirausaha baru kelautan dan perikanan berbasis pondok pesantren (*santripreneur*) telah dilakukan kepada 30 orang Santri di Pondok Pesantren Addainuriyah Dua, Semarang. Praktisi kewirausahaan yang dihadirkan yaitu Bapak Gendut Marjoko (Kadin Jateng/ CO-Founder PT. Gula Energi Nusantara) yang menyampaikan : 1) cara membangun sebuah usaha yg dimulai dari mindset, belief system dan pola pikir yang harus dimiliki orang seorang *entrepreneur*, 2) keunikan apa yg dimiliki oleh produk yang dihasilkan oleh wirausahawan yg berbeda dari competitor dan cara mengeksekusi sebuah ide usaha dengan menerapkan peta pikir yang benar untuk merealisasi sebuah usaha. Pada kegiatan ini santripreneur diminta untuk membuat ide bisnis dan menyusun business plan sederhana.



Gambar 3. 26 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Wirausaha Hasil KP di Kota Semarang

## 8. Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Pembiayaan

Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI pada Triwulan II telah dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah, Melawi Kalimantan Barat dan Kupang NTT. Hasil Kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Bimbingan Teknis di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 4 April 2024. Narasumber yang dihadirkan yaitu Anggota DPR RI Bapak Abdullah Tuasikal, Kabid Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Dinas Perikanan Kab. Maluku Tengah, DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah, *Manager* Bisnis BRI KC Kabupaten Maluku Tengah dan Ketua UMKM Wahyu Walang Walang. Acara ini dihadiri oleh 100 pelaku usaha perikanan dan calon wirausaha kelautan dan perikanan. Hasil pertemuan yaitu peserta memahami tahapan mengajukan NIB, mendapatkan informasi dan akses ke lembaga pembiayaan dan mendapatkan masukan bagaimana mengembangkan bisnis perikanan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.



Gambar 3. 27 Bimtek Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di Maluku Tengah

- b. Kegiatan Bimbingan Teknis di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024. Narasumber yang dihadirkan yaitu Anggota Komisi IV DPR RI Ibu Yessy Melania, S.E, Ibu Innes Rahmania mewakili Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Bpk, Heri Hariyadi mewakili Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Melawi, BRI Kantor Cabang Melawi dan UMKM Kelompok BUEKA (Bina Usaha Keluarga Aisiyah). Acara ini dihadiri oleh 100 pelaku usaha perikanan dan calon wirausaha kelautan dan perikanan. Hasil pertemuan yaitu sejumlah peserta meminta pendampingan kepada DPMPTSP untuk mengajukan NIB dan penjelasan pentingnya strategi pemasaran bagi UMKM.



Gambar 3. 28 Bimtek Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di Melawi

- c. Kegiatan Bimbingan Teknis di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024. Narasumber yang dihadirkan yaitu Anggota Komisi IV DPR RI Bapak Edward Tannur DPMPTSP Kabupaten Kupang, BRI Kantor Cabang Kabupaten Kupang dan Ibu Yustiana Suryati (UKM Mindari). Pada pertemuan ini BRI menyampaikan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat Perikanan dan bagaimana pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, sementara UMK Mindari menyampaikan pentingnya legalitas dalam meningkatkan usaha, diversifikasi produk olahan perikanan, serta strategi pemasaran produk dengan mempertimbangkan potensi yang ada di Kab. Kupang.



Gambar 3. 29 Bimtek Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di Kota Kupang

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp2.359.265.673,- atau setara dengan 31,16% dari total pagu sebesar Rp7.572.500.000,- Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp18.921.353,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran apabila dilihat dari besaran persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 45,71% yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran sebesar 31,16%.

## IK7. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)

Direktorat Jenderal PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP untuk mendukung keberlanjutan usaha, dengan melakukan fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pendampingan dalam mengakses kredit program yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, serta pengelolaan keuangan sederhana.

Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha adalah Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi dan intermediasi dalam kegiatan pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan, yang terdiri atas fasilitasi akses pembiayaan kredit program dan/atau fasilitasi pada pendampingan Gerai Investasi dan layanan usaha (GISELA) dan kegiatan pemberdayaan lainnya (fasilitasi kemitraan, perizinan dan kelembagaan).

**Tabel 3. 8 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW II 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)	600	-	-	2565	623	-	-	773	103,83	-	-	30,13

Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 2.565 UMKM, pada triwulan II tahun 2024 target yang ditetapkan sebanyak 600 UMKM. Realisasi capaian pada TW II yaitu sebanyak 623 UMKM atau setara dengan 103,83% terhadap target, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 30,13%. Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, karena formulasi penghitungan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Fasilitasi akses pembiayaan yang dilakukan berupa edukasi literasi keuangan dan pendampingan untuk menilai status kelayakan usaha UMKM dalam mengakses pembiayaan, baik ke lembaga keuangan bank ataupun nonbank di lokus-lokus prioritas KKP ditambah dengan

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha lainnya melalui kegiatan GISELA, Kemitraan, perizinan dan kelembagaan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja UMKM KP yang difasilitasi pemberdayaan usaha pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

1. Terlaksananya rapat koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan :

**a) Bimbingan Teknis Pembiayaan dan Fasilitasi GISELA, tanggal 7 Mei 2024 di Denpasar, Bali,**

Bimbingan Teknis dibuka oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh 110 peserta yang terdiri dari 90 perwakilan nelayan, suplier, pengolah, pemasar, dan koperasi dari Kabupaten Badung, Gianyar, Klungkung dan Kota Denpasar serta 20 orang perwakilan penyuluh perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Narasumber pada kegiatan ini antara lain Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, Pejabat Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya Direktorat Pengolahan, Kepala Departemen *Head Mikro Regional Office* BRI Denpasar dan Ketua Poklhasr Merta Segara.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pelaku UMKM sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Bali untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui Lembaga Perbankan dan Non Perbankan serta menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk meningkatkan usahanya.

Beberapa poin yang disampaikan oleh narasumber adalah sebagai berikut : (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memberikan sambutan pembuka dan paparan tentang informasi keragaan dan kebutuhan pembiayaan bagi UMKM di Provinsi Bali; (2) Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Bali menyampaikan kesiapannya untuk membantu pelaku UMKM sektor kelautan dan perikanan di Bali untuk mendapatkan NIB dan melakukan dukungan melalui fasilitasi Pelayanan Perijinan Bergerak yang akan mendatangi langsung ke lokasi pelaku UMKM; (3) Direktorat Pengolahan Ditjen PDSPKP KKP menyampaikan paparan mengenai “Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Pengembangan Diversifikasi Olahan Produk Perikanan”; (4) Kepala Departemen *Head Mikro, Regional Office* BRI Denpasar Bank Rakyat

Indonesia menyatakan bahwa Bank BRI akan terus membantu pelaku UMKM sektor kelautan dan perikanan dari sisi permodalan; (5) *Marketing Communication* PT. Aruna Jaya Nuswantara menginformasikan bahwa PT. Aruna Jaya Nuswantara membuka peluang untuk menjalin kemitraan usaha dengan pelaku UMKM Bali dari hulu ke hilir, dan ; (6) Ketua Poklhasr Merta Segara Klungkung hadir menceritakan keberhasilannya dalam mengembangkan usaha pemindangan ikan.

**b) Kegiatan fasilitasi pembiayaan bagi UMKM Perikanan di Kabupaten Tuban tanggal 21 Mei 2024 di Tuban, Provinsi Jawa Timur**

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan, akses pembiayaan, serta fasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha ultra mikro dalam rangka mendorong UMKM KP naik kelas melalui akses pembiayaan kredit program berbasis klaster pembiayaan sektor kelautan dan perikanan.

Narasumber utama berasal dari Bank Mandiri dan PT Pegadaian yang menyampaikan materi literasi keuangan terkait program Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan Ultra Mikro, dan skema pembiayaan lainnya (gadai emas, Tabungan haji).

Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan dirangkai dengan Layanan Terpadu Ditjen PDSPKP terkait konsultasi akses permodalan dari Bank Mandiri dan PT. Pegadaian, perizinan berusaha dan kelembagaan usaha dari Direktorat usaha dan Investasi serta Sertifikat Kelayakan Pengolahan dari Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

Hasil dari kegiatan adalah sebagai berikut (1) Komitmen dari 100 pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk dinaikkan kelasnya, dengan mendukung penuh program-program yang akan dilaksanakan di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban; (2) Komitmen pemerintah Kabupaten Tuban dalam rangka mendukung UMKM naik kelas, yaitu berupa: 1) rehabilitasi UPI melalui dana Pemda; 2) fasilitasi perizinan; 3) penyediaan paket 25.000 paket lele asap kepada keluarga resiko stunting; 4) pengembangan e-market untuk UMKM skala kecil dalam rangka perluasan akses pasar dan 5) Bupati Tuban mewajibkan 10% isi tokonya merupakan produk dari UMKM; (3) Komitmen dari Bank Mandiri untuk membentuk ekosistem pembiayaan sektor kelautan dan perikanan dengan menyalurkan kredit program dengan potensi pembiayaan lebih dari Rp. 12 Milyar dan memberikan pembinaan dengan program-program yang dimiliki Bank Mandiri.

**c) Kegiatan Bimbingan Teknis Pembiayaan dan Fasilitasi GISELA pada tanggal 13 Juni 2024 di Kabupaten Banyuwangi**

Bimbingan Teknis dibuka oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari 90 perwakilan nelayan, pembudidaya, supplier, pengolah, pemasar, dan koperasi dari Kabupaten Banyuwangi serta 10 orang perwakilan penyuluh perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.

Narasumber pada kegiatan ini antara lain Plh. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Perwakilan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi, Branch Manager BSI KCP Banyuwangi, Manager Regional Mekaar PT. PNM dan Ketua UD. Putra Samudra.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pelaku UMKM sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Banyuwangi untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui Lembaga Perbankan dan Non Perbankan serta menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk meningkatkan usahanya.

Pokok-pokok diskusi sebagai berikut (1) Poklhasar Temu Ulam mengharapkan agar Dinas Koperasi dapat melakukan pendampingan untuk menguatkan koperasi Umami yang saat ini kondisinya macet; (2) Poklhasar Tiga Putra mengharapkan Dinas Koperasi dapat membantu memfasilitasi pengurusan hak cipta (HAKI) atas produk barang/ jasa yang telah dihasilkan; (3) Asosiasi *Shrimp Club Indonesia* mengharapkan PT. BSI dapat membantu fasilitasi permodalan bagi teknisi budidaya udang yang ingin membuka usaha budidaya tambak udang sendiri; (4) Suplier ikan menjajaki peluang membeli ikan dari coldstorage UD. Putra Samudera untuk dikirim ke Bali; (6) Fasilitasi Koperasi Wangi Jaya yang akan mengelola Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Lateng dengan PT. BSI untuk menjajaki akses permodalan untuk operasional awal dari koperasi yang baru terbentuk.

**d) Kegiatan sosialisasi akses permodalan/Pembiayaan Usaha Sektor kelautan dan Perikanan tanggal 28 Juni 2024 di Semarang Jawa Tengah**

Kegiatan dihadiri oleh 30 peserta pelaku usaha kelautan dan perikanan kota Semarang yang didampingi penyuluh dan perwakilan dari DKP Prov. Jawa Tengah. Narasumber berasal dari BPD Jawa Tengah yaitu Bapak Taufik Zuliatmoko selaku Kepala Bagian Divis Ritel dan UMKM BPD Jawa Tengah di Booth Ditjen PDSPKP

bertempat di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi literasi keuangan serta fasilitasi akses pembiayaan kepada para pelaku usaha UMKM kelautan dan perikanan.

Dalam paparannya BPD Jateng menyampaikan literasi keuangan dan produk yang ditawarkan untuk UMKM yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro dan Kecil, KMJ Start Up Milenial, Kredit Lapak untuk Pedagang Pasar Tradisional dengan bunga 2%, Kredit Murah Jateng (KMJ) 25 JT, 75 Jt dan 500jt, Transformasi Digital Kepada Pelaku UMKM Ekosistem Digital Blangkon Jateng, serta Pelatihan dan Pendampingan kepada Pelaku UMKM Jateng. Sampai saat ini jumlah pembiayaan kepada UMKM di Bank Jateng sebanyak 97.006 NOA. Adapun pembiayaan paling besar pada Sektor Perdagangan sebesar 59,45% dan pembiayaan paling sedikit adalah Sektor Perikanan sebesar 1,53%. Untuk sector Perikanan tersebar di seluruh kab kota di Jawa Tengah dan terbanyak di Kab Rembang, Pati dan Tegal.

#### **e) Identifikasi lokasi dan potensi dalam rangka fasilitasi akses pembiayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Identifikasi diawali dengan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan informasi dari dinas, untuk okasi dengan potensi kelautan dan perikanan terbesar ada di Sungailiat kabupaten Bangka dengan estimasi jumlah pelaku usaha potensial sebanyak 3.943 pelaku usaha. Potensi tersebut saat ini sedang lesu karena perekonomian provinsi Bangka Belitung sedang menurun karena efek dari Perusahaan timah sebagai penyumbang aktivitas ekonomi terbesar yang sedang bermasalah.

Pada tahun 2024 dinas provinsi sedang menyusun RPJMD/RPD dengan tema ekosistem pembiayaan berbentuk klaster yang bisa diadaptasi, namun permasalahan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pelaku usaha adalah tentang tata niaga. Dengan adanya fasilitasi akses pembiayaan dan keterlibatan beberapa sektor terutama lembaga keuangan, diharapkan dapat membuka peluang baru dalam mengembangkan usaha sektor kelautan dan perikanan.

Dukungan pemerintah daerah pada tahun 2024 dalam upaya pembentukan ekosistem usaha kelautan dan perikanan adalah rencana Pembangunan sentra penyediaan bahan baku untuk pengolahan perikanan di lokasi TPI PPP baturusa, yang merupakan Lokasi UPTD provinsi;

Koordinasi dilanjutkan dengan melibatkan lembaga keuangan non bank yaitu PT. PNM. Saat ini PT. PNM telah melakukan Mou dengan Gubernur, dan akan ditindaklanjuti dengan PKS Dinas kelautan dan perikanan terkait pembinaan UMKM skala mikro. Saat ini jumlah UMKM yang menjadi debitur PT. PNM sebanyak ± 80.000 pelaku usaha dengan nilai npl dibawah 1%, yang tersebar di 20 unit cabang PNM di Provinsi Bangka Belitung. Pada tahun 2024 PT PNM berencana membentuk kampung madani di pangkalpinang di kampung nelayan kelurahan Ketapang dan PT. PNM berkomitmen utk memfasilitasi pembiayaan berbasis klaster di lokasi Kalamo dan ekosistem rantai bisnis yang sudah terbentuk, melakukan pembinaan berupa pelatihan dan pembekalan terhadap pengembangan produk hasil perikanan di Sungailiat.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program pada tahun 2024 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp3.300.000.000,-, hingga triwulan II anggaran yang terserap sebesar Rp1.061.871.155,- atau setara dengan 32,18% dari total anggaran. Dalam hal ini persentase penggunaan anggaran lebih besar daripada persentase realisasi capaian sebesar 30,13%, hal ini dikarenakan setiap kegiatan pemberdayaan terlebih dahulu dilaksanakan identifikasi dan rapat koordinasi dengan instansi terkait rencana pelaksanaan kegiatan, dimaksudkan agar setiap stakeholder yang terlibat lebih efektif dan tepat sasaran.

#### **IK8. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha (UMKM)**

Fasilitasi kemitraan usaha merupakan kerja sama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk mampu mengembangkan jaringan usahanya melalui kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha menengah besar. Fokus dari fasilitasi kemitraan usaha ini tersebar di seluruh bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.

Capaian ini diperoleh dengan menghitung setiap UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir adalah pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah atau besar yang berminat dan/atau melakukan kemitraan usaha atau

pelaku usaha skala mikro atau kecil yang difasilitasi dalam program sertifikasi produksi untuk menunjang kegiatan usaha.

**Tabel 3. 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi (UMKM) pada Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW II 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)	34	-	-	125	39	-	-	65	114,70	-	-	52

Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 125 UMKM. Capaian output UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 39 UMKM yang terdiri dari 35 UMKM yang terfasilitasi kemitraan, 2 UMKM yang terfasilitasi layanan perizinannya dan 2 UMKM yang terfasilitasi pembinaan melalui start up. Capaian ini setara dengan 114,7% dari target triwulan II sebanyak 34 UMKM. Jika diakumulasikan sampai dengan triwulan II maka capaian UMKM yang difasilitasi kemitraan usaha sebanyak 65 UMKM atau setara dengan 52% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 dari target 125 pelaku usaha. capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat metode perhitungan baru untuk IKU UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir yaitu dengan menambahkan jumlah pelaku usaha yang berminat/akan melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha yang melakukan kemitraan dalam rangka pengembangan usaha dan implementasi perizinan usaha dan jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraannya dengan startup perikanan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini sebagai berikut:

a) **Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.**

Dalam rangka fasilitasi kemitraan usaha dan pelayanan publik telah dilakukan kegiatan komitmen kemitraan bersama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tulungagung yang berlokasi di Semilir Resort pada tanggal 30 April 2024. Pada pertemuan tersebut hadir mewakili Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Tulungagung yaitu Ketua Tim Pelayanan Usaha dan Hasil Perikanan, serta 9 (Sembilan) UMKM pengolah dan pemasar hasil perikanan di wilayah Kab. Tulungagung yaitu UMKM Berkah Lumintu, Sumber Rejeki, Sumber Anugerah, Wanita Mulia, Mina Karya Putri, Karang Mulya, Mina Segar, Mina Miren dan Mina Bhakti Jaya.

Selain itu dilakukan diskusi dan *sharing session* terkait komitmen kemitraan usaha yang akan dibangun antar pelaku usaha tersebut. Adapun pada sesi diskusi ini para pelaku usaha yang merupakan UMKM pengolah dan pemasar banyak yang bertanya terkait bentuk Kerja Sama/kemitraan, dan tata cara pemenuhan perizinan/legalitas usaha.

Melalui pertemuan ini beberapa pelaku usaha telah menandatangani Nota Kesepahaman sebagai komitmen kemitraan sehingga dapat dijadikan landasan bagi kerjasama di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.



Gambar 3. 30 Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

**b) Fasilitasi Kemitraan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan di Surabaya, Jawa Timur (Partisipasi pada Kegiatan *Indonesia Tuna Investment & Bussiness Forum (ITIBF) 2024*.**

Pada forum tersebut disepakati sejumlah kerja sama antar pelaku usaha yang bertujuan memperluas pasar komoditas ikan tuna. Salah satunya adalah Koperasi Santo Alvin Pratama dari Ternate bersama PT. Bumi Menara Internusa yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Akses Pasar Produk Perikanan Bagi Pelaku Usaha Perikanan. Adapun tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah meningkatkan akses pasar produk perikanan bagi pelaku usaha perikanan melalui pemasaran berbasis keamanan pangan dan teknplogi pemrosesan yang modern dan komprehensif.

Dokumentasi Kegiatan:



Gambar 3. 31 Fasilitasi Kemitraan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan di Surabaya, Jawa Timur (Partisipasi pada Kegiatan Indonesia Tuna Investment & Bussiness Forum (ITIBF) 2024.

**c) Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur**

Dalam rangka fasilitasi kemitraan usaha dan pelayanan publik Tim melakukan kegiatan komitmen kemitraan bersama Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi yang berlokasi di Ruang Rapat hotel Kokoon tanggal 13 Juni 2024.

- Pada pertemuan tersebut hadir mewakili Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi yaitu Kabid PMP, dan 13 (tiga belas) UMKM pengolah dan pemasar hasil

perikanan di wilayah Kab. Banyuwangi yaitu UMKM Yetti Pantai Cemara, Tiga Putra, Maju Sejahtera, Mumbay Bahari, Rizky, Wina, Sekar Blambangan, Firta Laros, Mekar Arum, Temu Ulam, Marline, Bina Sejahtera dan Poklahsar Pelengsengan.

- Dalam pertemuan tersebut tim menyampaikan terkait kemitraan usaha sektor kelautan dan perikanan seperti yang diamanahkan melalui Permen KP Nomor 31 tahun 2023.
- Selain itu diskusi dan *sharing session* terkait komitmen kemitraan usaha yang akan dibangun antar pelaku usaha tersebut. Adapun pada sesi diskusi ini para pelaku usaha yang merupakan UMKM pengolah dan pemasar banyak yang bertanya terkait bentuk Kerjasama/kemitraan, dan tata cara pemenuhan perizinan/legalitas usaha.
- Hal yang dapat ditindak lanjuti oleh KKP cq. Timja Pelayanan dan Kemitraan Usaha dari pertemuan tersebut antara lain minat para pelaku usaha untuk bermitra, masih terdapat banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin P-IRT, sehingga dapat menjadi pertimbangan diselenggarakannya fasilitasi kemitraan dan perizinan usaha untuk SPP IRT bersama Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi.
- Melalui pertemuan ini beberapa pelaku usaha telah menandatangani Nota Kesepahaman sebagai komitmen kemitraan sehingga dapat dijadikan landasan bagi kerjasama di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.



Gambar 3. 32 Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

d) **Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Segara Bhumi Indonesia (SBI) dan Koperasi Kampung Nelayan Maju (KALAJU) Pulau Pasaran**

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal PDS untuk mendorong Koperasi Kampung Nelayan Maju (KALAJU) Pulau Pasaran, Bandar Lampung, agar dapat melakukan ekspor teri, pada tanggal 14 Juni 2024 di Balai Pertemuan dan Pelatihan Kalaju Pulau Pasaran diadakan rapat yang dipimpin oleh Direktur Pemasaran melalui *zoom meeting* . Rapat dihadiri oleh perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung, Dinas Perikanan Kota Bandar Lampung, Kantor Bea Cukai Lampung, Pelaku usaha pengolahan teri, penyuluh perikanan dan pengurus Koperasi Kampung Nelayan Maju (KALAJU) Pulau Pasaran.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024. Pada saat itu Ditjen PDS menawarkan skema kerjasama kepada PT. Segara Bhumi Indonesia (SBI) dan Koperasi Kampung Nelayan Maju (KALAJU) Pulau Pasaran untuk memanfaatkan dan mengelola fasilitas unit pengeringan ikan teri dan gudang berpendingin, serta pembelian bahan baku dari anggota koperasi yang akan dilakukan oleh PT. Segara Bhumi Indonesia (SBI) Kedua belah pihak sepakat dengan skema kerja sama tersebut.

Pada tanggal 15 Juni 2024 kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT. Segara Bhumi Indonesia (SBI) dan Koperasi Kampung Nelayan Maju (KALAJU) Pulau Pasaran tentang Kerja Sama Pengelolaan Unit Pengeringan Ikan, Gudang Berpendingin Dan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Ikan Teri Di Kampung Nelayan Maju Pulau Pasaran.



Gambar 3. 33 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Segara Bhumi Indonesia (SBI) dan Koperasi Kampung Nelayan Maju (KALAJU) Pulau Pasaran

e) **Identifikasi Kemitraan di Provinsi Banten.**

Identifikasi kemitraan usaha dilaksanakan dengan cara kunjungan lapang ke **UMKM Anugerah Sabajo** di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri, **UMKM Sinar Mutiara** di Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri, **UMKM Mahesa Jaya** di Desa Ketapang Kecamatan Mauk, **UMKM Manggala Putri** di Desa Patramanggala Kecamatan Kemiri, **UMKM Mina Sumber Rezeki** di Desa Pagedangan Ilir Kecamatan Kronjo, **UMKM Sri Juwana Makmur** di Kecamatan Tigaraksa.

a. **UMKM Anugerah Sabajo**

Produk UMKM ini adalah sate bandeng, sempol ikan, dimsum dengan bahan baku ikan segar.

Jumlah kebutuhan bahan baku ikan perbulan sebanyak 1000-5000 kilogram.

Sudah memiliki SOP penanganan bahan baku dan sudah memiliki rumah produksi yang terpisah dari rumah induk.

Dari aspek legalitas sudah mempunyai NIB, PIRT, sertifikat Halal dan sudah melakukan registrasi Merek sedangkan SKP sedang dalam proses pengajuan.

Dari aspek Keuangan, sudah membuat Laporan Keuangan secara manual dan rutin, membutuhkan pelatihan literasi keuangan.

Komponen yang sudah ada dalam kemasan yaitu merek produk, nama produk, Logo perusahaan, komposisi produk, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluwarsa dan saran penyajian.

Dari aspek pemasaran, produk sudah dipasarkan secara local (skala Kabupaten dan Kota), target pasar pedagang besar, produk dipasarkan di pasar tradisional, serta media social, belum melakukan aktivitas promosi penjualan, belum pernah melakukan ekspor.

b. **UMKM Sinar Mutiara**

Produk UMKM ini adalah kerupuk ikan dan ikan asin dengan bahan baku ikan segar yang diperoleh dari TPI dan distributor.

Belum memiliki SOP penanganan bahan baku.

Jumlah kebutuhan bahan baku ikan perbulan sebanyak 1000-5000 kilogram.

Dari aspek legalitas sudah mempunyai NIB, PIRT, sertifikat Halal dan sudah melakukan registrasi Merek sedangkan SKP sedang dalam proses pengajuan. Bentuk Usahanya CV.

Dari aspek Keuangan, sudah membuat Laporan Keuangan secara manual tapi tidak rutin, membutuhkan pelatihan literasi keuangan. Sudah pernah mendapatkan bantuan peralatan dari pemerintah seperti Chest Freezer, peralatan pengolahan. Dari aspek Sumber Daya Manusia belum mempunyai tenaga kerja tetap.

Komponen yang sudah ada dalam kemasan yaitu merek produk, nama produk, Logo perusahaan, komposisi produk, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluwarsa dan saran penyajian.

Dari aspek pemasaran, produk sudah dipasarkan secara local (skala Kabupaten dan Kota), target pasar pedagang besar, produk dipasarkan di pasar tradisional, serta media social, belum melakukan aktivitas promosi penjualan, belum pernah melakukan ekspor.

c. **UMKM Mahesa Jaya**

Produk UMKM ini adalah risoles, siomay ikan, dan kerupuk dengan bahan baku ikan segar, dan diperoleh dari pedagang kecil.

Sudah memiliki SOP penanganan bahan baku.

Jumlah kebutuhan bahan baku ikan perbulan sebanyak 11-500 kilogram.

Dari aspek legalitas sudah mempunyai NIB, sertifikat Halal, belum memiliki SKP. Bentuk Usahanya CV.

Dari aspek Keuangan, sudah membuat Laporan Keuangan secara manual dan rutin, membutuhkan pelatihan literasi keuangan.

Dari aspek Sumber Daya Manusia mempunyai tenaga kerja tetap dan tenaga kerja lepas.

Komponen yang sudah ada dalam kemasan yaitu merek produk, nama produk, Logo perusahaan, berat bersih, informasi nilai gizi, komposisi produk, keterangan allergen, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluwarsa dan saran penyajian.

Dari aspek pemasaran, produk sudah dipasarkan secara local (skala Kabupaten dan Kota), target pasar konsumen akhir, produk dipasarkan melalui

media social, sudah melakukan aktivitas promosi penjualan, belum pernah melakukan ekspor.

d. **UMKM Manggala Putri**

Produk UMKM ini adalah bandeng halu, bandeng presto, bandeng caramel, stik bandeng, risoles tuna, siomay ikan, dan abon tuna dengan bahan baku ikan segar, dan diperoleh dari pedagang kecil.

Sudah memiliki SOP penanganan bahan baku.

Jumlah kebutuhan bahan baku ikan perbulan sebanyak 11-500 kilogram.

Dari aspek legalitas sudah mempunyai NIB, sertifikat dari BPOM, sertifikat Halal, belum memiliki SKP. Bentuk Usahanya kelompok.

Dari aspek Keuangan, sudah membuat Laporan Keuangan secara manual dan rutin, membutuhkan pelatihan literasi keuangan. Sudah pernah mendapatkan bantuan peralatan dari pemerintah seperti Chest Freezer, cool box dan peralatan pengolahan.

Dari aspek Sumber Daya Manusia mempunyai tenaga kerja tetap dan tenaga kerja lepas.

Komponen yang sudah ada dalam kemasan yaitu merek produk, nama produk, Logo perusahaan, berat bersih, informasi nilai gizi, komposisi produk, keterangan allergen, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluwarsa dan saran penyajian.

Dari aspek pemasaran, produk sudah dipasarkan secara local (skala Kabupaten dan Kota), target pasar konsumen akhir, produk dipasarkan melalui media social, sudah melakukan aktivitas promosi penjualan, belum pernah melakukan ekspor.

e. **UMKM Mina Sumber Rezeki**

Produk UMKM ini adalah siomay ikan, kerupuk, dan abon dengan bahan baku ikan segar, dan diperoleh dari nelayan/pembudidaya.

Sudah memiliki SOP penanganan bahan baku.

Jumlah kebutuhan bahan baku ikan perbulan sebanyak 11-500 kilogram.

Dari aspek legalitas sudah mempunyai NIB, PIRT, sertifikat Halal dan SKP sedang dalam proses. Bentuk Usahanya kelompok.

Dari aspek Keuangan, sudah membuat Laporan Keuangan secara manual dan rutin, membutuhkan pelatihan literasi keuangan.

Dari aspek Sumber Daya Manusia mempunyai tenaga kerja tetap dan tenaga kerja lepas.

Komponen yang sudah ada dalam kemasan yaitu merek produk, nama produk, Logo perusahaan, berat bersih, informasi nilai gizi, komposisi produk, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluwarsa dan saran penyajian.

Dari aspek pemasaran, produk sudah dipasarkan secara local (skala Kabupaten dan Kota), target pasar konsumen akhir dan pedagang kecil, produk dipasarkan di took/outlet, rumah produksi serta media social, sudah melakukan aktivitas promosi penjualan, belum pernah melakukan ekspor.

f. **UMKM Sri Juwana Makmur**

Produk UMKM ini adalah kerupuk lele dan abon lele dengan bahan baku ikan segar, dan diperoleh dari nelayan/pembudidaya.

Sudah memiliki SOP penanganan bahan baku.

Jumlah kebutuhan bahan baku ikan perbulan sebanyak 11-500 kilogram.

Dari aspek legalitas sudah mempunyai NIB, Sertifikat Standar, PIRT, sertifikat Halal dan sudah melakukan registrasi Merek sedangkan SKP sedang dalam proses perpanjangan. Bentuk Usahanya kelompok.

Dari aspek Keuangan, sudah membuat Laporan Keuangan secara manual dan rutin, membutuhkan pelatihan literasi keuangan. Sudah pernah mendapatkan bantuan peralatan dari pemerintah seperti vacuum dan oven.

Dari aspek Sumber Daya Manusia mempunyai tenaga kerja tetap dan tenaga kerja lepas.

Komponen yang sudah ada dalam kemasan yaitu merek produk, nama produk, Logo perusahaan, berat bersih, informasi nilai gizi, komposisi produk, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluwarsa dan saran penyajian.

Dari aspek pemasaran, produk sudah dipasarkan secara local (skala Kabupaten dan Kota), target pasar konsumen akhir dan pedagang kecil, produk

dipasarkan di toko/outlet, rumah produksi serta media social, sudah melakukan aktivitas promosi penjualan, belum pernah melakukan ekspor.

Keenam UMKM tersebut berkomitmen untuk mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang berkelanjutan di Kabupaten Tangerang dan mempunyai minat untuk bermitra dengan UMKM lainnya, baik dalam hal peningkatan mutu produk, peningkatan kualitas produk dan kemasan serta peningkatan pemasaran produk.

Selain kunjungan lapang tersebut, juga dilakukan koordinasi dan diskusi dengan Dinas Perikanan Serang mengenai potensi kemitraan usaha.



Gambar 3. 34 Identifikasi Kemitraan di Provinsi Banten

f) **Identifikasi Kebutuhan Kemitraan Pelaku Usaha Rumput Laut di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara**

Dalam rangka menindaklanjuti kebutuhan kemitraan pelaku usaha rumput laut di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, maka pada tanggal 16 Mei 2024 telah dilaksanakan rapat melalui *aplikasi zoom meeting* yang dibuka oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dipimpin Katimja Pelayanan dan Kemitraan Usaha.

Rapat dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) serta para pelaku usaha rumput laut antara lain perwakilan PT. Greencity Mbangun Indonesia, perwakilan PT. Galic Bina Mada, perwakilan PT. Hydrocolloid Indonesia, perwakilan PT. Galic Artha Bahari, perwakilan PT. Kappa Carrageenan Nusantara, perwakilan PT. Gumindo Perkasa Industri, dan perwakilan PT Algalindo Perdana. Selain itu hadir juga perwakilan dari setiap Timja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP.

Rapat ini sebagai inisiasi awal, antar pelaku usaha sebagai *sharing* informasi mengenai kebutuhan produk rumput laut yang dapat diserap industri.

Diharapkan melalui diskusi kali ini ada *business matching* dan kesepakatan antara Greency dengan industri rumput laut lainnya.

**g) *startup milenial***

Dalam rangka Kordinasi dan pemetaan *startup* bidang kelautan pada tanggal 26 sd 28 Juni 2024 dilakukan pertemuan dengan Ketua Inkubator Bisnis UNDIP (Universitas Diponegoro) yaitu Bapak Idris perwakilan dari PT. Mitra Distribusi Lestari. PT Mitra Distribusi Lestari bergerak dibidang sektor ritel marketplace dan pendampingan serta pelatihan UMKM bagi ekosistem usaha mitra MDL sehingga brand mereka dapat lebih dikenal MDL sendiri merupakan pecahan dari *indofishery* dan perwakilan PT Aruna Samudera dan Poklahsar Sidodadi dengan jenis usaha produk turunan rumput laut seperti permen rumput laut, stik rumput laut dan manisan rumput laut.

Tujuan dilakukan kegiatan inkubasi bisnis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Inkubasi bisnis binaan UNDIP baik dalam baik jumlah maupun jenis usaha. Model pembinaan dan kemitraan yang diterapkan dalam penumbuhan wirausaha di kalangan mahasiswa dan untuk mengetahui UMKM mana saja yang masuk dalam binaan UNDIP. Selain itu juga untuk mendapatkan masukan terkait pengembangan usaha mulai dari pembentukan, inkubasi dan sampai usaha UMKM binaan tersebut bisa menjadi usaha mandiri. Inkubasi bisnis juga bertujuan untuk mengetahui model pembinaan usaha baru yang lebih efektif dan tepat sasaran baik itu model pelatihan maupun pendampingannya serta untuk mengetahui jumlah dan jenis bidang *startup* binaan.

Dalam perkembangannya PT MDL (yang berdiri sejak tahun 2022) telah membuat suatu ekosistem bisnis dimana UMKM yang bermitra dengan PT DML telah di bantu sistem manajemen usaha dan pemasaran produk. Dalam ekosistem bisnis, PT MDL terdiri dari usaha penghela atau suppoting dengan beberapa UMKM atau poklahsah yang menjadi mitranya

Untuk merekrut atau memilih mitranya PT MDL menilai dari kondisi usaha yang baik namun secara perkembangnya masih stagnan. Kemudian mitra yang terpilih di bombing dalam menjalankan usahanya termasuk manajemen dan pembiayaan. Salah satu contoh mitra binaan PT MDL adalah PT. Alisha yang memproduksi makanan berbahan ikan yang dimasak dengan bumbu yang siap untuk dimakan. PT

MDL melakukan pembinaan dan asistensi usaha sampai bisa memproduksi dengan brand mitra.

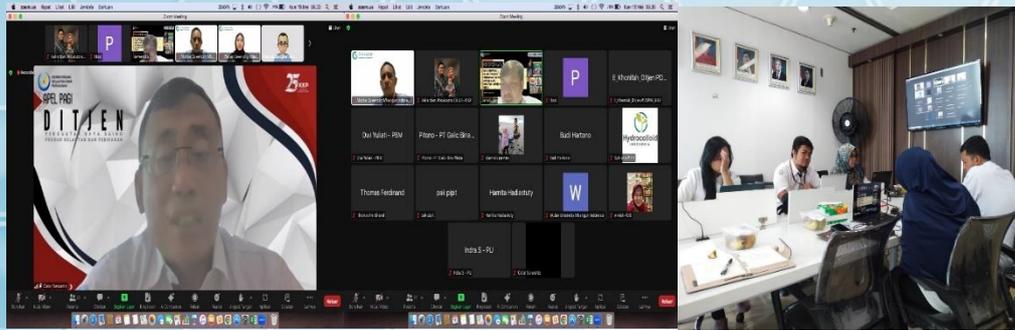
Mitra binaan PT MDL yang telah berjalan dengan baik dan juga telah membina UMKM adalah PT Arum Samudera yang telah membina dan melakukan pendampingan dan Kemitraan dengan Poklaksar Sidodadi

Salah satu bentuk pendampingan dan bantuan non anggaran yang dilakukan adalah dengan membuat konten yang menarik yang dapat digunakan oleh UMKM binaan untuk berpromosi di media sosial

Dari pembiayaan yang digunakan PT MDL untuk membantu mitra dalam pengembangan usaha menggunakan bantuan dari CSR (Corporate Social Responsibility) PT Astra yang berkisar sampai 600 jutaan dalam setahun yang mana penggunaannya adalah untuk mengembangkan UKMyang bergerak dibidang perikanan yang ada di daerah jawa tengah termasuk jepara pati dan sekitarnya PT MDL mempunyai ada dua lini bisnis utama pasca panen dan pendampingan UMKM untuk. Dapur produksi ke kebun yang digunakan Mba titin teknologi retort yang membuat sate ambal yang adalah sate ayam yang siap dikonsumsi.

Tahapan rekrutmen yang dilakukan adalah dengan Pembentukan klaster usaha. Klaster usaha perikanan dibagi menjadi klaster per jenis produk akan semakin mudah untuk melakukan pembinaannya. Bentuk grup yang terdiri dari beberapa poklaksar dan tiap grup diberi tantangan untuk mengetahui keseriusan kelompok untuk mendapatkan bimbingan dan pendampingan. Setiap grup ada ketua kelompok yang akan membantu dalam melakukan tugas tugas yang akan dilakukan .

Adapun kriteria yang digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan pendampingan usaha dari PT MDL antara lain : Mau, produk laku dijual dan setelah itu dikaji dahulu sentuhan apa yang diperlukan untuk membuat produk bisa diterima dengan baik dipasar, setelah itu dilakukan Research and Development tentang produk dan market positioning. Membantu dalam pembukuan dan keuangan termasuk untuk menghitung HPP produk, manajemen produksi, kerjasama dengan BCA dan transaksi mitra bisa diketahui oleh MDL.



Gambar 3. 35 Identifikasi Kebutuhan Kemitraan Pelaku Usaha Rumput Laut di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp526.037.604,- atau setara dengan 30,93% dari total pagu sebesar Rp1.701.000.000,- . Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran yang terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 52% dimana nilai persentase tersebut lebih besar dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 30,93%.

### 3.2.6 Sasaran Strategis 6

**Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan**

**IK9. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan**

Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi didefinisikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dalam lingkup penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada Direktorat Usaha dan Investasi. Untuk mencapai capaian tersebut tenaga kerja yang dihitung adalah setiap tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi ataupun tenaga kerja yang tidak langsung pada proses produksi pada masing-masing usaha mikro kecil dan menengah sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan fasilitasi sosialisasi dan pembinaan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Usaha dan Investasi.

**Tabel 3. 10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW II 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi	2650	4794	-	10770	2721	5044	-	3827	102,67	-	-	35,53

Pada tahun 2024, target tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi sebanyak 10.770 orang sedangkan target pada triwulan II sebanyak 2650 orang. Capaian realisasi yang telah dihitung oleh Direktorat Usaha dan Investasi pada triwulan II adalah sebesar 2721 orang tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung atau setara dengan 102,67%.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Usaha dan Investasi untuk mendukung capaian ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Bekasi dan Karawang  
Pra pembentukan lembaga usaha hasil KP dalam rangka peningkatan kelembagaan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2024 di tuban. Dari hasil pertemuan yang dilakukan ditetapkan bahwa nama calon koperasi desa Bulumeduro Tuban memiliki calon anggota yang terdiri dari 7 KUB dan 12 Poklhasar dengan jumlah anggota seluruhnya berjumlah 96 orang. Prapendirian Koperasi Di Kabupaten Serang dikalsanakan pada tanggal 22 Mei 2024, calon koperasi di Kabupaten Serang terdiri dari 3 kelompok antara lain Poklhasar Bahari Maju Bersama Kabupaten Serang, Poklhasar Mekar Sari Jaya Bahari Kabupaten Serang, KUB Bahtera Jaya Kabupaten Serang.
2. Fasilitasi kewirausahaan;  
Dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Baru, serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Direktorat Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha melalui UMKM Naik Kelas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di

Kabupaten Mojokerto, Probolinggo, Semarang, Pasuruan, Bogor dan Sampang pada periode bulan April – Juni 2024.

Selain pembinaan juga telah dilaksanakan kegiatan penciptaan wirausaha baru kelautan dan perikanan berbasis pondok pesantren (*santripreneur*). Kegiatan ini telah dilakukan kepada 30 orang Santri di Pondok Pesantren Addainuriyah Dua, Semarang.

3. Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI. Bimtek ini telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Melawi Kalimantan Barat dan Kupang NTT.
4. Temu fasilitasi akses pembiayaan kredit kelautan dan perikanan di Tuban, 21 Mei 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan, akses pembiayaan, serta fasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha ultra mikro dalam rangka mendorong UMKM KP naik kelas melalui akses pembiayaan kredit program berbasis klaster pembiayaan sektor kelautan dan perikanan. Narasumber utama berasal dari Bank Mandiri dan PT Pegadaian yang menyampaikan materi literasi keuangan terkait program Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan Ultra Mikro, dan skema pembiayaan lainnya (gadai emas, Tabungan haji).
5. Bimbingan Teknis Pembiayaan dan Fasilitasi GISELA di Bali dan Banyuwangi. Bimbingan Teknis dibuka oleh Direktorat Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari perwakilan nelayan, supplier, pengolah, pemasar, dan koperasi serta perwakilan penyuluh perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Narasumber pada kegiatan ini antara lain Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan lembaga keuangan bank dan nonbank. Tujuan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pelaku UMKM sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Bali untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui Lembaga Perbankan dan Non Perbankan serta menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk meningkatkan usahanya.
6. Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Jawa Timur; Dalam rangka fasilitasi kemitraan usaha dan pelayanan publik telah dilakukan kegiatan komitmen kemitraan bersama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tulungagung yang berlokasi di Semilir Resort pada tanggal 30 April 2024. Pada

pertemuan tersebut hadir mewakili Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Tulungagung yaitu Ketua Tim Pelayanan Usaha dan Hasil Perikanan, serta 9 (Sembilan) UMKM pengolah dan pemasar hasil perikanan di wilayah Kab. Tulungagung yaitu UMKM Berkah Lumintu, Sumber Rejeki, Sumber Anugerah, Wanita Mulia, Mina Karya Putri, Karang Mulya, Mina Segar, Mina Miren dan Mina Bhakti Jaya.

Melalui pertemuan ini beberapa pelaku usaha telah menandatangani Nota Kesepahaman sebagai komitmen kemitraan sehingga dapat dijadikan landasan bagi kerjasama di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Pada pertemuan tersebut dihadiri Dinas Perikanan dan Peternakan Provinsi/Kab/Kota, UMKM pengolah dan pemasar hasil perikanan di wilayah-wilayah tersebut.

Melalui pertemuan ini juga pelaku usaha telah menandatangani nota kesepahaman sebagai komitmen kemitraan untuk dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat dilakukan Analisa kebutuhan para pelaku usaha untuk dibangun kemitraan antar pelaku usaha kelautan dan perikanan kedepannya.

### 3.2.7 Sasaran Strategis 7

**Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

#### **IK10. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi**

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK  $\geq 75$ .

**Tabel 3. 11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Realisasi terhadap Target	Persentase Realisasi
-------------------	--------	-----------	--------------------------------------	----------------------

	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW II 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW II terhadap target 2024
Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	-	75	-	75	-	82,33	-	-	-	109,77	-	-

Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi tahun 2024 ditargetkan sebesar 75. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

Dalam rangka pencapaian target dimaksud, Direktorat Usaha dan Investasi telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya pemenuhan indikator kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu dengan melibatkan seluruh pegawai Direktorat Usaha dan Investasi untuk menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal pada periode sebelumnya, melalui rapat koordinasi intensif pada masing-masing area dengan dukungan dari Sekretariat Ditjen PDSPKP, serta melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian WBK.

#### **IK11. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kompetensi merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/ workshop/ magang/ kursus.

Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin.

**Tabel 3. 12 Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW II 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	75	83,2	76	87	85,11	92,11	76,8	85,11	113,48	110,71	110,82	97,82

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha dan Investasi tahun 2024 ditargetkan sebesar 87. Capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha dan Investasi pada triwulan II/semester I tahun 2024 sebesar 85,11 atau setara dengan 113,48% dibandingkan dengan target triwulan II/semester I, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 maka persentase realisasi sebesar 97,82.

Berdasarkan data Dashboard IP ASN, nilai IP ASN Direktorat Usaha dan Investasi yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen yaitu sebesar 81,39 (kategori tinggi) yang terdiri atas komponen Kualifikasi 21,18; komponen Kompetensi dengan nilai 30,38; komponen Kinerja dengan nilai 24,83; dan komponen Disiplin dengan nilai 5.

IP ASN 2024												
Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023												
Silakan ketik Nama Unit Kerja. <input type="button" value="Cari"/>												
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	76	21.64	86.56 %	25.1	62.75 %	25.2	84 %	5	100 %	76.94	SEDANG
2	DIREKTORAT LOGISTIK	50	22.1	88.4 %	28.33	70.82 %	24.2	80.67 %	5	100 %	79.63	SEDANG
3	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU	50	22.34	89.36 %	33.99	84.97 %	25.1	83.67 %	5	100 %	86.44	TINGGI
4	DIREKTORAT PEMASARAN	57	21.63	86.52 %	32.52	81.3 %	25.09	83.63 %	5	100 %	84.24	TINGGI
5	DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI	38	22.34	89.36 %	32.63	81.58 %	25.13	83.77 %	5	100 %	85.11	TINGGI
6	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	87	21.18	84.72 %	30.38	75.95 %	24.83	82.77 %	5	100 %	81.39	TINGGI

Gambar 3. 36 Dashboard IP ASN Direktorat Usaha dan Investasi Semester I Tahun 2024

Pada triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Usaha dan Investasi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas berdasarkan rencana aksi yang telah disusun yaitu (1) pelayanan kepegawaian dan (2) peningkatan kompetensi pegawai yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan rapat pembahasan teknis acara jiwa korsa lingkup PDSPKP tanggal 19 April 2024 di GMB III KKP.
2. Pemantauan pengisian kinerja pegawai pada aplikasi kinerja BKN triwulan I tahun 2024 tanggal 25 April 2024 di Raiser Ikan Hias, Kab. Bogor.
3. Menghadiri undangan Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024 tanggal 29 April 2024 di Hotel Raffles Jakarta.
4. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Kode Etik Pegawai Ditjen PDSPKP tanggal 22 Mei 2024 di GMB KKP.

#### IK12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih

baik. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah evaluasi pengukuran kinerja dan revidi laporan kinerja bersama APIP yang pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum dapat dihitung nilai capaiannya pada triwulan berjalan.

**Tabel 3. 13 Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW II 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	-	80,5	-	84	-	83,30	-	-	-	103,48	-	-

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi pada aplikasi Kinerjaku KKP yang mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2024 ditargetkan 80,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

Pada triwulan II, kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat Usaha dan Investasi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas diantaranya:

- 1) Pembahasan pengukuran capaian kinerja lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan I tahun 2024, penginputan capaian kinerja pada SAPK dan verifikasi capaian kinerja triwulan I Tahun 2024 tanggal 1-2 April 2024 di Red Top Hotel Jakarta.



Capaian Uraian Kerja Desember - 2023  
 Unit Kerja: Direktorat Utama  
 Skor Kinerja: 102,36

No	Sesuan	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Pelaksanaan	Target Desember 2023	Target Desember 2024	Capaian Desember
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (TUKP) Diinstansi Jember	KSPD1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Data Cakupan	Indeks	Stasioner	78,00	79,00	80,00
Perbaikan Target:						Perbaikan Capaian:		
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (TUKP) Diinstansi Jember	KSPD2	Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (IPKPP) Data Cakupan	Indeks	Stasioner	81,20	81,20	82,00
Perbaikan Target:						Perbaikan Capaian:		
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (TUKP) Diinstansi Jember	KSPD3	Indeks Peningkatan Keterbacaan Informasi Publik (IPKIP) Data Cakupan	Indeks	Stasioner	81,00	81,00	82,00
Perbaikan Target:						Perbaikan Capaian:		
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (TUKP) Diinstansi Jember	KSPD4	Indeks Keterbacaan Informasi Publik (IKIP) Data Cakupan	Indeks	Stasioner	80,00	80,00	80,00



Gambar 3. 37 Pembahasan pengukuran capaian kinerja lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan I tahun 2024

- 2) Pembahasan laporan kinerja level 1 dan 2 Ditjen PDSPKP periode triwulan I tahun 2024 tanggal 4-5 April 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong.



Gambar 3. 38 Pembahasan laporan kinerja level 1 dan 2 Ditjen PDSPKP periode triwulan I tahun 2024

- 3) Pembahasan validasi indikator kinerja level I Ditjen PDSPKP tahun 2024 dan validasi indikator kinerja level II Ditjen PDSPKP tahun 2024 pada tanggal 14 Mei 2024 di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar, Jl. Sempur No 1, Kota Bogor.



Gambar 3. 39 Pembahasan validasi Indikator Kinerja Level I dan II Ditjen PDSPKP Tahun 2024

- 4) Rapat evaluasi pencapaian target rencana aksi pengelolaan sampah plastik sektor kelautan dan perikanan, serta pembahasan sasaran dan indikator kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 tanggal 16 Mei 2024 di RR.Investasi, GMB III.



Gambar 3. 40 Pembahasan Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029

- 5) Rapat pemutakhiran target dan capaian rencana aksi nasional (RAN) Kewirausahaan dan KUKM triwulan I tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 di RR Biro Perencanaan, GMB I, KKP, Jakarta.



Gambar 3. 41 Rapat pemutakhiran target dan capaian rencana aksi nasional (RAN) Kewirausahaan dan KUKM TW I Tahun 2024

- 6) Rapat pemutakhiran data progres pencapaian output lingkup Ditjen PDSPKP sampai dengan bulan Mei 2024 tanggal 29 Mei 2024 di RR Setditjen PDSPKP GMB III, KKP, Jakarta.



Gambar 3. 42 Rapat pemutakhiran data progres pencapaian output lingkup Ditjen PDSPKP sampai dengan bulan Mei 2024

- 7) Pembahasan mekanisme dan pedoman SAKIP serta uji coba penilaian PM SAKIP lingkup Ditjen DSPKP tahun 2024 tanggal 4-6 Juni 2024 di Red Top Hotel, Jakarta.



Gambar 3. 43 Pembahasan Mekanisme dan Pedoman SAKIP serta Uji coba penilaian PM SAKIP lingkup Ditjen DSPKP Tahun 2024

- 8) Penyusunan tindak lanjut rekomendasi pencapaian indikator kinerja level I dan level II triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2023, dan triwulan I tahun 2024 pada tanggal 10 Juni 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong dan 11 Juni 2024 di Wisma Gracilaria, Jakarta.



Gambar 1. Penyusunan tindak lanjut rekomendasi pencapaian indikator kinerja level I dan level II triwulan I s.d triwulan IV tahun 2023, dan triwulan I tahun 2024

- 9) Penilaian mandiri SAKIP unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2024 tanggal 19-21 Juni 2024 di Grand Mercure Jakarta.



Gambar 3. 44 Penilaian Mandiri SAKIP Unit Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024

### IK13. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Ditjen PDSPKP merupakan pernyataan profesional

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

**Tabel 3. 14 Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW II 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (persentase)	-	100	-	100	-	100	-	-	-	100	-	-

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2024 ditargetkan 100. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

**IK14. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

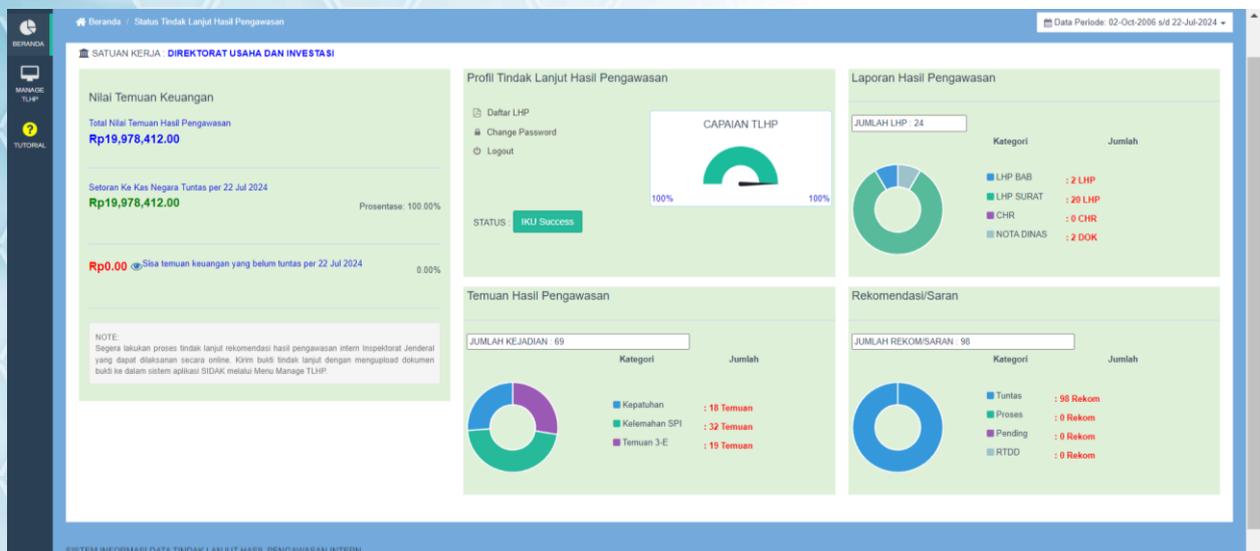
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit. Pengukuran capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dilakukan setiap triwulan.

Pada Triwulan IV 2023, Direktorat Usaha dan Investasi dengan difasilitasi oleh Ditjen PDSPKP telah mengikuti pembahasan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan pada tanggal 15 Desember di Raiser Ikan Hias, Cibinong, terhadap keseluruhan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan II 2024, Berdasarkan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan Itjen KKP melalui Aplikasi

SIDAK, tindak lanjut hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II 2024 mencapai 100%, dimana seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP atau dapat dilihat pada Aplikasi SIDAK dengan periode perhitungan triwulanan.

**Tabel 3. 15 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW II 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi (%)	80	75	75	80	100	100	100	100	125	133,33	120	120



Gambar 3. 45 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 22 Juli 2024

### IK15. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

**Tabel 3. 16 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024 Tahun 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi	-	1	-	1	-	2	-	-	-	200	-	-

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Usaha dan Investasi tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1 inovasi. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

Capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik yang disusun oleh Ditjen PDSPKP, diseleksi dan diajukan ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh Koordinator Reformasi. Pada tahun 2024, nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 75. Capaian pada Indikator kinerja ini adalah 79,79 setara dengan 106,39%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Sedangkan kelompok inovasi mencakup: kelompok umum dan kelompok khusus. Perhitungan perhitungan capaian untuk aspek penilaian kelompok umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), signifikansi (25%), kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (5%), adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%) dan kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian kelompok khusus mencakup pembaruan/peningkatan inovasi (25%), adaptabilitas (20%), penguatan keberlanjutan (25%) dan evaluasi (30%).

#### **IK16. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar**

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur sasaran kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (MP) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Portal *Collaboration Office* (Coofis) di laman <https://portal.kkp.go.id> periode Triwulan I Tahun 2024, yang pengukurannya dilakukan

setiap triwulan. Capaian kinerja persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3. 17 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan IV Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024 Tahun 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi (%)	94	92	92	94	133,33	133,33	133,33	133,33	141,84	144,92	144,92	141,84

Pada triwulan II tahun 2024, persentase unit kerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar mencapai 133,33% atau setara dengan 141,84% terhadap target triwulan II tahun 2024 sebesar 94%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya target indikator kinerja ini mengalami kenaikan sebesar 2,17% dari capaian tahun 2023 sebesar 92%.

Pengukuran capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan II Tahun 2024 menggunakan *Platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan *platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>) .

#### **IK17. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi menetapkan target persentase realisasi anggaran sebesar 95 Persen. Adapun capaian indikator ini sebagai berikut.

**Tabel 3. 18 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	
Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi (%)	-	95	-	93,75	-	99	-	-	-	104,21	-	-

Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2024 ditargetkan 93,75%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024. Namun dalam rangka memenuhi indikator kinerja tersebut realisasi anggaran Direktorat Usaha dan Investasi sebesar Rp 3.105.090.448,- dari total anggaran sebesar Rp17.806.985.000,- atau setara dengan 17,44%.

## BAB IV. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan II Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Dalam melaksanakan misi pembangunan kelautan dan perikanan yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan melalui berbagai kebijakan yang telah ditempuh serta program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode triwulan II tahun 2024, Direktorat Usaha dan Investasi telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan sesuai target.

Dalam masa *recovery* setelah pandemi Covid-19 berdampak pada adanya perubahan kebijakan pemerintah yang menyesuaikan dengan kondisi global yang mulai kembali seperti sebelum adanya pandemi covid-19, yang menyebabkan adanya penyesuaian kegiatan pada periode awal di tahun 2024. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Usaha dan Investasi terus melaksanakan koordinasi intensif dengan instansi terkait. Diharapkan pada periode berikutnya akan terjadi percepatan pelaksanaan kegiatan, sehingga Indikator Kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

### 4.2. Rekomendasi

Secara umum, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode mendatang antara lain:

1. Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait regulasi terbaru tentang perizinan berusaha;

2. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan melalui kredit program di Kabupaten Sukabumi, Bangka, Yogyakarta dan Jepara
3. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan.

#### 4.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas rekomendasi pada triwulan I 2024, sebagai berikut:

No	Rekomendasi Triwulan I 2024	Tindak Lanjut Pada Triwulan II 2024
1	Penyusunan peluang investasi ready to offer perlu dilaksanakan perlu dilaksanakan identifikasi Peluang Investasi Komoditas Tuna	Telah tersusun peluang investasi ready to offer Industri Pengolahan Ikan Tuna Terintegrasi
2	Rencana pelaksanaan business forum pada triwulan II tahun 2024	1. Telah dilaksanakan <i>Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024</i> tanggal 29 April 2024 2. telah dilaksanakan <i>Indonesia Tuna Investment and Business Forum (ITIBF) 2024</i> tanggal 25 Juni 2024
3	Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPSTP terkait regulasi terbaru tentang perizinan berusaha;	1. Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan di Tuban pada tanggal 21 Mei 2024, 2. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis dan Layanan Gisela di Tuban pada tanggal 21 Mei 2024, 3. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis dan Layanan Gisela di Bali pada tanggal 7 Mei 2024
4	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan melalui kredit program di Kabupaten, Tuban, Banyuwangi dan Bali	1. Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan di Tuban pada tanggal 21 Mei 2024, 2. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis dan Layanan Gisela di Tuban pada tanggal 21 Mei 2024, 3. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis dan Layanan Gisela di Bali pada tanggal 7 Mei 2024
5	Melaksanakan koordinasi dengan Kelompok Kerja Pembiayaan Kredit Program	Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Kelompok Kerja

<p>Sektor Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan.</p>	<p>Pembiayaan pada tanggal 26 April 2024</p>
<p>Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait percepatan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan</p>	<p>selama periode triwulan II telah dilaksanakan Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI di Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah, Melawi Kalimantan Barat dan Kupang NTT.</p>

# LAMPIRAN

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI



### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [persuratan.pds@kkp.go.id](mailto:persuratan.pds@kkp.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Catur Sarwanto**  
Jabatan : Direktur Usaha dan Investasi

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Budi Sulistiyo**  
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,  
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing  
Produk Kelautan dan Perikanan

  
Budi Sulistiyo

PIHAK PERTAMA,  
Direktur Usaha dan Investasi

  
Catur Sarwanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	1.	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5
		2.	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8
2.	Tersedianya dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i>	3.	Dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i> (Dokumen)	4
3.	Terlaksananya promosi usaha dan investasi	4.	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	4
4.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	5.	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	45
5.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	6.	Wirusaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	875
		7.	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)	2.565
		8.	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha (UMKM)	125
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	9.	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (Orang)	10.770
7.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi	10.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75
		11.	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	87
		12.	Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	84

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	13. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Usaha dan Investasi (%)	100
	14. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	80
	15. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1
	16. Persentase unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	94
	17. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	93,75

#### DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000)
1.	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	22.723.500
<b>Total Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024</b>		<b>22.723.500</b>

Jakarta, Januari 2024

**PIHAK KEDUA,**  
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing  
Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

**PIHAK PERTAMA,**  
Direktur Usaha dan Investasi



Catur Sarwanto

## Lampiran 2.

# Memorandum penyampaian capaian dan data dukung laporan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM  
Nomor 545/DJPSPKP.2/TU.140/VI/2024

Yth. : Direktur Jenderal PDSPKP  
Dari : Direktur Usaha dan Investasi  
Hal : Penyampaian Realisasi Capaian IKU Level II Direktorat Usaha dan Investasi dan Realisasi Anggaran Periode Triwulan II Tahun 2024  
Lampiran : Satu berkas  
Tanggal : 12 Juli 2024

Dalam rangka pemenuhan pelaporan kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan realisasi capaian IKU dan anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat Usaha dan Investasi yang telah dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Dokumen Peluang Investasi yang Ready to offer

Dokumen peluang investasi yang *ready to offer* merupakan dokumen yang mengangkat potensi daerah dan peluang investasinya berdasarkan komoditas unggulan dan/atau kawasan/lokasi prioritas. Penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi 1 (satu) dokumen yaitu Dokumen Peluang Investasi Komoditas Tuna, secara presentase capaian realisasi dokumen peluang investasi *ready to offer* sebesar 25% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yakni 4 dokumen.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp241.738.104,- atau setara dengan 21,45% dari total pagu sebesar Rp1.126.953.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 75%, lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 21,45%.

### 2. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan

Kegiatan promosi usaha dan investasi bertujuan untuk menarik minat investasi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan perluasan usaha. Capaian kinerja promosi usaha dan investasi pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 2 kegiatan promosi yaitu *Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024* yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024 dan *Indonesia Tuna Investment and Business Forum (ITIBF) 2024* yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sehingga secara akumulatif sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah tercapai sebanyak 3 kegiatan atau tercapai 75% dari target tahun 2024 yakni 4 kegiatan.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.212.755.389,- atau setara dengan 53,74% dari total pagu sebesar Rp2.256.532.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 75%, lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 53,74%.

### 3. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya

Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya sampai dengan triwulan II tahun 2024 terealisasi sebanyak 10 lembaga usaha, atau setara 100% jika dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2024 sebanyak 4 lembaga. Apabila diakumulasikan maka lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya telah terealisasi sebanyak 14 lembaga atau setara dengan 31,11% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 45 lembaga. Adapun lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya pada triwulan II Tahun 2024, yaitu:

- 1) Koperasi nusa indah sukadami, Bekasi
- 2) Koperasi Mega Jelita Raya, Bekasi
- 3) Koperasi konsumen dermasandi maju, tegal
- 4) Koperasi Produsen Mina Guna Sejahtera, Pekalongan
- 5) Koperasi Produsen Berkah Rajungan Nusantara, Kabupaten Jepara
- 6) Koperasi Kalama Wangi Jaya, Kabupaten Banyuwangi
- 7) Koperasi Produsen Kerapu Warloka Bersinar, Kabupaten Manggarai Barat
- 8) Koperasi Produsen Berkah Jaya Pasir Putih, Kabupaten Karawang
- 9) Koperasi Produsen Mina Peundeuy Sedulur, Kabupaten Karawang
- 10) Koperasi Produsen Multi Pihak Mina Sagara Jaya, Rembang

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp399.367.713,- atau setara dengan 21,59% dari total pagu sebesar Rp1.850.000.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 31,11% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 21,59%.

### 4. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina

Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebanyak 250 UKM/wirausaha atau setara 100% dari target triwulan I, jika diakumulasikan sampai dengan triwulan II maka jumlah wirausaha yang telah ditumbuhkan/dibina sebanyak 400 UKM/wirausaha atau setara 45,71% dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebanyak 875 UKM/wirausaha. Capaian tersebut terdiri dari 300 UKM/wirausaha yang difasilitasi melalui kegiatan Pembinaan dan

Pendampingan Wirausaha Baru dan 100 UKM/wirausaha dari kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Pembiayaan.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp2.359.265.673,- atau setara dengan 31,16% dari total pagu sebesar Rp7.572.500.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp18.921.353,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran apabila dilihat dari besaran persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 45,71% yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran sebesar 31,16%.

### 5. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha

Capaian indikator kinerja ini terdiri dari Jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program dan jumlah UMKM Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan layanan Gisela, capaian sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah 773 UMKM atau setara dengan 103,06% dibandingkan dengan target triwulan II sebesar 750 UMKM. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 maka persentase capaian sebesar 30,13%.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja ini pada tahun 2024 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp3.300.000.000,-, hingga triwulan I anggaran yang terserap sebesar Rp1.061.871.155,- atau setara dengan 32,18% dari total anggaran. Dalam hal ini persentase penggunaan anggaran lebih besar daripada persentase realisasi capaian sebesar 30,13%, hal ini dikarenakan setiap kegiatan pemberdayaan terlebih dahulu dilaksanakan identifikasi dan rapat koordinasi dengan instansi terkait rencana pelaksanaan kegiatan, dimaksudkan agar setiap stakeholder yang terlibat lebih efektif dan tepat sasaran.

### 6. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir

Realisasi jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah 85 UMKM, capaian ini terdiri dari 55 UMKM yang terfasilitasi kemitraan usaha dan investasi dan 3 pelaku usaha yang difasilitasi pelayanan usaha dan investasinya dan 2 pelaku usaha yang dibina melalui startup. Nilai persentase capaian ini setara dengan 108,33% dari target triwulan II atau jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 125 UMKM maka persentase capaiannya sebesar 52%.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp526.037.604,- atau setara dengan 30,93% dari total pagu sebesar Rp1.701.000.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 52% daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 30,93%.

### Lampiran 3

Daftar lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya :

1. Koperasi Lele Mambo Berseri di Kabupaten Sampang ;
2. Koperasi Asap Indah Wonosari di Kabupaten Demak;
3. Koperasi Pijarmas di Kabupaten Demak; dan
4. Koperasi Sri Say Dem di Kabupaten Demak.
5. Koperasi Nusa Indah Sukadami, Bekasi
6. Koperasi Mega Jelita Raya, Bekasi
7. Koperasi Konsumen Dermasandi Maju, Tegal
8. Koperasi Produsen Mina Guna Sejahtera, Pekalongan
9. Koperasi Produsen Berkah Rajungan Nusantara, Kabupaten Jepara
10. Koperasi Kalamo Wangi Jaya, Kabupaten Banyuwangi
11. Koperasi Produsen Kerapu Warloka Bersinar, Kabupaten Manggarai Barat
12. Koperasi Produsen Berkah Jaya Pasir Putih, Kabupaten Karawang
13. Koperasi Produsen Mina Peundeuy Sedulur, Kabupaten Karawang
14. Koperasi Produsen Multi Pihak Mina Sagara Jaya, Rembang